



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

ALAMAT : Jl. Jendral sudirman





PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5	BELANJA DAERAH	23.898.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	20.745.372.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.492.336.081,00	20.361.961.844,00	86,74	20.386.192.205,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.609.708.864,00	6.337.364.078,00	83,27	7.487.881.130,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.063.727.117,00	13.790.197.765,00	85,85	21.898.511.175,00
5.1.09	Belanja Bantuan Sosial	18.500.000,00	14.800.000,00	79,73	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.492.336.081,00	20.361.961.844,00	86,74	20.386.192.205,00
5.2	BELANJA MODAL	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
5.2.02	Belanja Modal Perawatan dan Meubel	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
	JUMLAH BELANJA	23.898.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	20.745.372.305,00
	SURPLUS/DEFISIT	(23.898.894.081,00)	(20.463.338.194,00)	85,62	(20.745.372.305,00)

Kab. Kutai Kartanegara, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA


DAFIP HARVANDI, S.Sos., M.Si.
NIP.191009251990031001



PEMERINTAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
NEBRACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	15.796.914.889,43	14.447.472.747,89
1.1	ASET LANCAR	223.449.868,80	179.398.275,89
1.1.01	Persediaan	223.449.868,80	179.398.275,89
	JUMLAH ASET LANCAR	223.449.868,80	179.398.275,89
1.2	ASET TETAP	15.564.365.716,43	12.485.219.139,89
1.2.01	Tanah	2.454.312.171,43	1.381.250.000,00
1.2.02	Peralatan dan Meubel	11.721.249.444,00	11.105.352.044,00
1.2.03	Gedung dan Bangunan	7.489.223.474,20	7.409.223.474,20
1.2.04	Jalan, Jembatan, dan Irigasi	381.776.119,30	381.776.119,30
1.2.07	Akumulasi Penyusutan	(8.112.372.498,00)	(8.112.372.498,00)
	JUMLAH ASET TETAP	15.564.365.716,43	12.485.219.139,89
1.3	ASET LAINNYA	1.382.855.313,80	1.382.855.313,80
1.3.03	Aset Tidak Berwujud	85.000.000,00	85.000.000,00
1.3.04	Aset Lain-lain	1.319.152.000,00	1.319.152.000,00
1.3.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.196.687,00)	(22.196.687,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.382.855.313,80	1.382.855.313,80
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	15.796.914.889,43	14.447.472.747,89
2	KEWAJIBAN	188.865.527,89	19.227.422,89
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	188.865.527,89	19.227.422,89
2.1.01	Utang Pajak	188.865.527,89	19.227.422,89
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	188.865.527,89	19.227.422,89
	JUMLAH KEWAJIBAN	188.865.527,89	19.227.422,89
3	EKUITAS	15.182.648.472,43	14.428.115.205,89
3.1	EKUITAS	15.182.648.472,43	14.428.115.205,89
3.1.01.01	Surplus Defisit Laba	(25.742.485.715,00)	(26.863.234.105,00)
3.1.01	Ekuitas yang Tidak Dibagikan	29.499.473.302,43	29.745.372.305,89
	JUMLAH EKUITAS	15.182.648.472,43	14.428.115.205,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	15.796.914.889,43	14.447.472.747,89

Kab. Kutai Kartanegara, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

DARYUSANTO, S.Sw., M.Si.
NIP. 1510054199011001



PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	14.428.115.325,00	15.345.877.036,00
SURPLUS / (DEFIT) - LO	(20.742.486.216,00)	(30.683.134.016,00)
KK PPKD	21.496.419.505,43	29.745.572.505,00
DAMPAK KUMUH, ATIF PERUBAHAN KEBIDAKSARAN, SALAHAN MENYADAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIR REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	15.182.048.472,43	14.428.115.325,00

Kab. Kutai Kartanegara, 14 Januari 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DAVIP HARVANTO, S.Sos., M.Si

NIP. 197009241000011001



PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	14.428.115.325,00	13.345.877.036,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(20.742.486.218,00)	(30.683.174,00)
EK. PKD	21.496.419.365,43	28.743.772.309,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBHAKAN/KESELALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	15.182.048.472,43	14.428.115.325,00

Kab. Kutai Kartanegara, 14 Januari 2026

KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA



DAFTI HARYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP.197009241900031001



PEMERINTAHAN KAB. KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
0	BEBAN	28.742.486.218,00	30.663.134.816,00	(8.920.647.798,00)	(32,35)
8.1	BEBAN OPERASI	28.742.486.218,00	29.228.891.947,00	(8.482.565.729,00)	(29,52)
8.1.01	Beban Pegawai	6.770.682.741,00	7.271.376.944,00	(500.694.203,00)	(6,97)
8.1.02	Beban Bangun dan Sewa	13.957.403.477,00	21.933.675.003,00	(7.996.271.526,00)	(56,42)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	28.742.486.218,00	29.228.891.947,00	(8.482.565.729,00)	(29,52)
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.438.082.669,00	(1.438.082.669,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.242.447.791,00	(1.242.447.791,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	148.391.619,00	(148.391.619,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jembatan dan Irigasi	0,00	27.243.039,00	(27.243.039,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya Aset Tidak Berwujud	0,00	19.800.000,00	(19.800.000,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0,00	1.438.082.669,00	(1.438.082.669,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	28.742.486.218,00	30.663.134.816,00	(8.920.647.798,00)	(32,35)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(28.742.486.218,00)	(30.663.134.816,00)	8.920.647.798,00	(32,35)

Kab. Kutai Kartanegara, 14 Januari 2025
KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

DAFFIR HARYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 197009241990011001



DAFTAR ISI

Halaman

BAB I - PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN	4
2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	4
2.2. Kebijakan Belanja Daerah	4
2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	5
BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	6
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	6
3.1.1. Pendapatan	6
3.1.2. Belanja	6
3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI	8
4.1. Entitas Pelaporan	8
4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	9
4.2.1. Basis Akuntansi	9
4.2.2. Prinsip Nilai Historis	9
4.2.3. Prinsip Realisasi	9
4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal	10
4.2.5. Prinsip Periodisitas	10
4.2.6. Prinsip Konsistensi	10
4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap	10
4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar	10
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	10
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset	10
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA	19
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja	20
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer	20
4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	20
4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO	20
4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban	21
4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi	21
BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN	22
5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
5.1.1. PENDAPATAN - LRA	22
5.1.2. BELANJA	22
5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN	30
5.2. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL	30
5.2.1. PENDAPATAN - LO	31
5.2.2. BEBAN	32
5.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	42
5.2.4. KEGIATAN NON OPERASIONAL	42
5.2.5. POS LUAR BIASA	42



5.3.	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
5.3.1.	EKUITAS AWAL	42
5.3.2.	SURPLUS/DEFISIT-LO	43
5.3.3.	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	43
5.4.	PENJELASAN POS-POS NERACA	43
5.4.1.	ASET	43
5.4.2.	KEWAJIBAN	64
5.4.3.	EKUITAS	65
BAB VI -	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	65
6.1.	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan	66
6.2.	Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas	66
BAB VII -	PENUTUP	67
LAMPIRAN		1

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan pembagian kewenangan (*power sharing*) dan pembagian keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama-sama dengan DPRD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025, sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan manajemen pemerintahan, agar tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni:

"Menuju Terwujudnya Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berkeadilan"

Dengan adanya reformasi di bidang keuangan daerah, yang ditandai dengan lahirnya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berusaha menerapkan ketentuan-ketentuan terbaru dalam pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, dalam tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang merupakan pedoman teknis dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** Berbasis Akrua! Tahun Anggaran 2025 disusun dan disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Sebagai Sarana pertanggungjawaban dari Pengguna Anggaran SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** atas pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
- b. Menyediakan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- d. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- f. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- h. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan tahun 2024 berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- l. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 30 Desember 2024
- m. PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 30 Desember 2024
- n. PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN TAHAP SATU ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 28 Februari 2025
- o. PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN TAHAP DUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 15 Maret 2025.
- p. PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN TAHAP TIGA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 7 Juli 2025
- q. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal, 7 November 2025

r. PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025, Tanggal,
7 November 2025

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis
Akrual Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas pelaporan
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
	4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
BAB V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
	5.1 LRA
	5.1.1 Pendapatan-LRA
	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Pembiayaan
	5.2 LO
	5.2.1 Pendapatan-LO
	5.2.2 Beban
	5.2.3 Surplus/Defisit Dari Operasi
	5.2.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	5.2.5 Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa
	5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
	5.3.1 Ekuitas Awal
	5.3.2 Surplus/Defisit-Lo
	5.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
	5.4 Neraca
	5.4.1 Aset
	5.4.2 Kewajiban
	5.4.3 Ekuitas
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
BAB VII	Penutup

BAB II - KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menggambarkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang didanai oleh keuangan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, dengan cara mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Struktur APBD Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: (1) Penerimaan daerah yang didalamnya terdapat Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, yang dioperasionalkan didalam APBD.

2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan atas kebijakan umum pendapatan daerah pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil;
- c. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sebagai komitmen taat azas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan Pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, seiring dengan RPJMD Kabupaten Kutai kartanegara 2021 - 2026, sebagai berikut:

- Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3. Kebijakan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembiayaan cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman Daerah, pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran berkenaan. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.
- Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

BAB III - IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang diceminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka pada tahun 2024 Laporan Keuangan SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** menganut anggaran surplus/defisit.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2024 menunjukkan realisasi pencapaian target keuangan sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan

Target Pendapatan SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target, mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00.

Realisasi pendapatan tersebut merupakan bagian dari kontribusi Pemberian Izin Untuk Mendirikan Suatu Bangunan sebesar Rp0,00, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.1.1.

Gambar 3.1.1 Pendapatan Daerah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Jumlah	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Belanja

Total Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp. 23.898.894.081,00** realisasinya mencapai **85,62%** atau sebesar **Rp. 20.463.338.194,00**. Proporsi terbesar realisasi belanja adalah Belanja Operasi sebesar **Rp. 20.361.961.844,00** atau **85,94%**, dan Belanja Modal sebesar **Rp. 101.376.350,00** atau **49,08%**

Gambar 3.1.2 Belanja Operasi
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2025

Belanja Operasi	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Kenaikan / (Penurunan)
Belanja Pegawai	6.557.364.079,00	7.487.681.130,00	(930.317.051,00)
Belanja Barang dan Jasa	13.790.197.765,00	21.898.511.175,00	(8.108.313.410,00)
Belanja Modal	101.376.350,00	359.180.000,00	(257.803.650,00)
Jumlah	20.463.338.194,00	29.745.372.305,00	

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 6.557.364.079,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp 7.487.681.130,00 mengalami Penurunan sebesar Rp (930.317.051,00) atau 86,17%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 13.790.197.765,00 bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 21.898.511.175,00 mengalami Penurun sebesar Rp. (8.108.313.410,00) atau 85,85%

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Realisasi Belanja Modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 101.376.350,00 bila dibandingkan realisasi tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 359.180.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp. (257.803.650,00) (49,08) %

3.2. Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Secara umum permasalahan yang masih dihadapi SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2025 antara lain:

- a. Adanya Efisiensi Anggaran, dan Perubahan Anggaran sehingga menghambat Pelaksanaan Kegiatan
- b. Proses penganggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga beberapa belanja dalam kegiatan tidak dapat dilaksanakan, tapi harus menunggu di APBD Perubahan karena kesalahan penganggaran.
- c. Sulitnya dalam proses Pelaporan yang melibatkan petugas di lapangan, karena adanya perbaikan/maintenance aplikasi sehingga menghambat proses pelaporan di lapangan, keterbatasan jumlah petugas dan kurangnya kompetensi dalam pembuatan laporan.

Dalam mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi, serta untuk tetap menjaga konsistensi dalam pemenuhan target kinerja yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :

- a. Lebih intensif melakukan pelaporan dan koordinasi dengan pihak BPKAD dan pihak terkait
- b. Melakukan pengawasan terhadap proses perencanaan dan penganggaran agar tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kegiatan.
- c. Meningkatkan kompetensi petugas di lapangan melalui pelatihan-pelatihan.
- d. Penyusunan APBD berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

BAB IV - KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sesuai dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Kebijakan Akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis Akrual berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara beserta perubahannya.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi SKPD.
2. Sistem Akuntansi PPKD.
3. Bagan Akun Standar.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari :

1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan.
2. Kebijakan Akuntansi Akun.

Implementasi kebijakan akuntansi harus dilakukan oleh *Entitas Pelaporan* dan *Entitas Akuntansi* secara bersamaan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan ketentuan.

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Pelaporan menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan SAL/SAK;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Perubahan Ekuitas;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Entitas Akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan secara manual dan menggunakan aplikasi komputer. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

4.2. Prinsip Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Terdapat delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

- a. Basis akuntansi;
- b. Prinsip nilai historis;
- c. Prinsip realisasi;
- d. Prinsip substansi mengungguli formalitas;
- e. Prinsip periodisitas;
- f. Prinsip konsistensi;
- g. Prinsip pengungkapan lengkap; dan
- h. Prinsip penyajian wajar

Berikut uraian singkat kedelapan Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;

4.2.1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asling dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan organisasi mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai suatu entitas pelaporan.

4.2.2. Prinsip Nilai Historis

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

4.2.3. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah daerah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

4.2.4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2.5. Prinsip Periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode- periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

4.2.6. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (*prinsip konsistensi internal*). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2.8. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 dijelaskan lebih lanjut dalam kebijakan akuntansi sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014. Pengukuran akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan mata uang rupiah.

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

1) Kas dan Setara Kas

- a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
- c) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d) Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- e) Atas dasar butir b tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

2) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

3) Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dapat terjadi karena :

- a) Pungutan pendapatan daerah;
- b) Perikatan;
- c) Transfer antar pemerintah; dan
- d) Kerugian daerah.

Piutang yang terjadi karena pungutan pendapatan daerah antara lain piutang pajak dan piutang pendapatan daerah selain pajak. Piutang yang terjadi karena perikatan yang meliputi pinjaman antar daerah, perikatan jual beli, perikatan kemitraan, pemberian fasilitas/jasa, dan transaksi dibayar di muka. Piutang yang terjadi karena transfer antar pemerintah terjadi bila hak pemerintah daerah atas dana transfer belum diterima oleh pemerintah daerah baik dari pemerintah yang lebih tinggi maupun antar pemerintah daerah. Piutang yang terjadi karena kerugian daerah merupakan piutang atas tuntutan ganti rugi (TGR) dan tuntutan perbendaharaan (TP).

Piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi daerah diakui setelah diterbitkan surat ketetapan atau saat terbitnya SK yang menetapkan kekurangan atas realisasi pembayaran pajak/retribusi/PAD lainnya atau Surat Tagihan atau koreksinya. Piutang yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria :

- a) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b) Jumlah piutang dapat diukur;
- c) Telah diterbitkan surat penagihan/sejenisnya dan/atau telah dilaksanakan penagihan;
- d) Belum diunasi sampai dengan akhir periode pelaporan

Piutang yang timbul karena transfer antar pemerintahan diakui sebagai berikut:

- a) Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- b) Piutang Dana Alokasi Umum diakui bila terdapat jumlah Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Presiden yang belum ditransfer, dan Pemerintah Pusat mengakuinya dengan menerbitkan dokumen yang sah atas hal tersebut.
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus diakui bila terdapat klaim pembayaran oleh daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran.

Piutang Kerugian Daerah diakui sebagai berikut :

- a) Adanya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai.
- b) Apabila penyelesaian TP/TGR dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada Surat Ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pada prinsipnya piutang disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai nominal piutang dikurangi dengan penyisihan piutang. Nilai nominal piutang yang timbul karena ketentuan perundang-undangan

- a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan atau surat tagihan yang diterbitkan atau koreksinya.
- b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan untuk WP yang mengajukan banding.
- c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Pengadilan.

Nilai nominal piutang yang berasal dari perikatan, disajikan sebagai berikut :

- a) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- c) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- d) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Nilai nominal piutang yang berasal dari transfer disajikan sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
- b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
- c) Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat yang belum diterima.

Nilai Nominal piutang yang berasal dari ganti rugi disajikan sebesar nilai yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang

- a) Penyisihan piutang karena peraturan perundang-undangan seperti pajak dan retribusi diatur sebagai berikut.

Tabel 4.3.1 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

Tabel 4.3.2 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Lancar dengan Perhatian	10%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Kurang Lancar	25%
4	Di atas 3 - 4 tahun	Diragukan	50%
5	Diatas 4 tahun	Macet	100%

- b) Penyisihan piutang yang berasal dari perikatan, pemberian pinjaman, penjualan dan pemberian fasilitas jasa, transfer antar pemerintah, karena ganti rugi, dan piutang lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3.3 Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Umur	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	0 - 1 tahun	Lancar	0%
2	Di atas 1 - 2 tahun	Kurang Lancar	25%
3	Di atas 2 - 3 tahun	Diragukan	50%
4	Diatas 3 Tahun	Macet	100%

Dalam hal terdapat fakta/bukti yang menunjukkan bahwa piutang benar benar tidak dapat ditagih, atas piutang tersebut dilakukan penyisihan 100% sesuai dengan fakta bukti yang dimaksud.

- c) Penyisihan piutang BLUD diatur dengan ketentuan yang mengatur tentang BLUD.

4) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui:

- pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

sedangkan investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara tidak berkelanjutan

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :

- 1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable); dan
- 3) dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Investasi Jangka Panjang terdiri atas:

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk piutang dana bergulir atau dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen antara lain dapat berupa :

- a) Pembelian Surat Utang Negara;
- b) Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah
- c) Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
- d) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- e) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja bergulir;
- f) Investasi non permanen lainnya.

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjual belikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi permanen terdiri dari :

- a) Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu :

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba

kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

c. Aset Tetap

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Dalam hal tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tanggal diterimanya hak kepemilikan atas aset tetap dan direalisasinya pembayaran dalam bentuk kas, aset tetap dapat diakui pada saat realisasi. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria :

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 5) Memiliki nilai minimal sebesar batas kapitalisasi.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk besa impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap. Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dapat dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) Perolehan Awal Aset Tetap merupakan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut.

- 1) peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.
- 2) aset tetap lainnya seperti barang berwujud budayakeserian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dan tidak dimaksudkan untuk dijual dengan nilai pengadaan per unitnya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, diklasifikasikan sebagai aset tetap dan dianggarkan dalam belanja modal. Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi dicatat secara ekstrakomptabel (di luar neraca) dan dianggarkan dalam belanja barangjasa.

Aset tetap disajikan dengan diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset Tetap terdiri dari:

1) Tanah;

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat

dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

2) Peralatan dan Mesin;

Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.

3) Gedung dan Bangunan;

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan meriam; dan rambu-rambu.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

5) Aset Tetap Lainnya;

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut.

- 1) Pemeliharaan konstruksi meliputi gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas.
- 2) Pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan aset tetap yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan dan dibukukan per tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai

aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.4 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3	ASET TETAP	
1 3 2	Peralatan dan Mesin	
1 3 2 01	Alat-Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat-Alat Besar Apung	8
1 3 2 03	Alat-alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Peralatan Komputer	4
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 20	Peralatan Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit-Unit Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	
1 3 2 28		10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1 3 3	Gedung dan Bangunan	
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	40
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50
1 3 3 06	Candi	50
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lain	50
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Tahun Tung Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

Kodifikasi	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1 3 3 10	Rambu-Rambu	50
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1 3 4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1 3 4 01	Jalan	10
1 3 4 02	Jembatan	50
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 3 4 05	Bangunan Air Rawa	25
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 10	Bangunan Air	40
1 3 4 11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30

Keterangan: Masa Manfaat Aset Tetap berdasarkan Permendagri No.64 Tahun 2014

Aset tetap tanah berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan tidak disusutkan. Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak budaya, hewan atau tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut tidak dapat digunakan atau mati yang didasarkan atas Surat Keputusan Penghapusan oleh Bupati atau dokumen lainnya. Aset tetap lainnya yaitu aset renovasi disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat sesuai dengan masa perjanjian pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya. Dalam hal perjanjian yang menyangkut aset induk aset renovasi tidak mengatur batasan yang tegas tentang masa pinjam pakai / sewa / perjanjian lainnya, maka masa manfaat aset renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh

Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) **Kemitraan dengan Pihak Ketiga:**

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a) Bangun, Kelola, Serah (BKS)
- b) Bangun, Serah, Kelola (BSK)

4) **Aset Tidak Berwujud:**

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Aset tidak berwujud diamortisasi secara garis lurus selama 5 tahun kecuali aset tidak berwujud dalam pengerjaan, seluruh aset tidak berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, berdasarkan masa manfaatnya yang dihitung secara bulanan sejak bulan perolehan aset tidak berwujud tersebut. Dalam hal informasi tentang masa manfaat aset tidak berwujud tidak diperoleh, maka masa manfaat aset tetap renovasi ditetapkan selama 5 (lima) tahun.

5) **Aset Lain-lain:**

Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat Aset Lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena rusak berat dihentikan penyusutannya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena hilang/ dalam penelusuran tetap disusutkan. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap karena dipinjam-pakai atau dikerjasamakan tetap dilakukan penyusutan.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam neraca pemerintah daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek; dan
- 2) Kewajiban Jangka Panjang.

f. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan LRA terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA;
- b. Pendapatan Transfer – LRA; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA.

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

- a. Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- b. Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Kas yang digunakan langsung oleh satker/SKPD dan tanpa penyetoran pendapatan ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Pengakuan Transfer sama dengan pengakuan Belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja. Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan, dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan

jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, Pendapatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO dapat diakui:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan;
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Beban dapat diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban;
- b. terjadinya konsumsi aset; dan
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban, atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada periode tahun berkenaan. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Koreksi

Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V - PENJELASAN POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 , dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tanggal 23 Februari 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tanggal 26 September 2024.

5.1.1. PENDAPATAN - LRA

Realisasi Kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA periode tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	Realisasi 2022
PENDAPATAN - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gambaran dari tabel diatas menunjukan bahwa Anggaran Pendapatan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2025 terealisasi sebesar Rp0.00 atau 0.00% dari target pendapatan yang direncanakan sebesar Rp0.00. Dibandingkan realisasi Tahun 2024 sebesar Rp0.00 maka realisasi pendapatan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0.00.

5.1.2. BELANJA

Belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2025 telah direalisasikan sebesar Rp. 20.463.338.194,00. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah tahun anggaran 2025 serta realisasi tahun anggaran 2024 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.2
Anggaran dan Realisasi Belanja

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	Kenaikan / (Penurunan)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$\frac{4}{3} \times 100$		5
5	BELANJA DAERAH	23.698.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	(9.282.034.111,00)	29.745.372.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.692.336.081,00	20.361.961.844,00	85,94	(9.024.230.461,00)	29.386.192.305,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.609.706.964,00	6.557.364.079,00	86,17	(930.317.051,00)	7.487.661.130,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.063.727.117,00	13.790.197.765,00	85,85	(8.108.313.410,00)	21.898.511.175,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	14.400.000,00	-
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.692.336.081,00	20.361.961.844,00	85,94	(9.024.230.461,00)	29.386.192.305,00
					-	
5.2	BELANJA MODAL	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	(257.803.650,00)	359.180.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	(257.803.650,00)	359.180.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	(257.803.650,00)	359.180.000,00
					-	
	JUMLAH BELANJA	23.898.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	(9.282.034.111,00)	29.745.372.305,00
					-	
	SURPLUS/DEFISIT	(23.898.894.081,00)	(20.463.338.194,00)	85,62	9.282.034.111,00	(29.745.372.305,00)

Data tabel diatas menunjukkan anggaran belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 23.898.894.081,00 terealisasi sebesar Rp. 20.463.338.194,00 atau 85,62 %, dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp. 29.745.372.305,00 yang berarti mengalami Penurunan sebesar Rp. (45,36)%.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi dibagi ke dalam Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi tahun anggaran 2025 dan tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.3
Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	Kemudian / (Penurunan)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6	7
5.	BELANJA DAERAH	23.898.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	(9.282.034.111,00)	29.745.372.305,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.692.338.081,00	20.361.961.844,00	85,94	(9.024.230.461,00)	29.386.192.305,00
5.1.01	Belanja Pegawai	7.609.708.964,00	6.557.364.079,00	86,17	(930.317.051,00)	7.487.681.130,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.063.727.117,00	13.790.197.765,00	85,85	(8.108.313.410,00)	21.898.511.175,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	14.400.000,00	-

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 23.692.338.081,00 dengan realisasi sebesar Rp. 20.361.961.844,00 atau 85,62%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dijelaskan sebagai berikut.

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Akun Belanja Pegawai ini meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan. Anggaran dan realisasi belanja Pegawai SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun Anggaran 2025 Dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.1.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5.1.01	Belanja Pegawai	7.609.708.964,00	6.557.364.079,00	86,17	7.487.681.130,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.415.114.763,00	3.812.347.993,00	86,35	3.893.676.791,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	3.253.760.956,00	2.892.691.500,00	88,90	2.824.261.514,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	285.582.148,00	218.076.042,00	76,36	210.936.502,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	82.442.000,00	65.100.000,00	78,96	66.490.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	123.874.000,00	119.476.000,00	96,45	99.388.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	128.505.000,00	103.980.000,00	80,92	98.370.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	178.092.549,00	133.787.500,00	76,25	132.021.660,00

5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	87.415.515,00	55.926.687,00	63,98	28.233.420,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	645.250,00	36.285,00	5,62	36.732,00
5.1.01.01.09	Belanja kurat Jaminan Kesehatan ASN	242.009.889,00	197.157.348,00	81,47	210.681.376,00
5.1.01.01.10	Belanja kurat Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	9.321.797,00	6.029.119,00	64,68	5.814.335,00
5.1.01.01.11	Belanja kurat Jaminan Kematian ASN	23.465.859,00	18.087.512,00	77,08	17.443.252,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.194.594.201,00	2.745.016.886,00	85,93	3.100.434.339,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Betan Kerja ASN	3.066.794.201,00	2.707.516.086,00	88,28	3.100.434.339,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	90.000.000,00	-	-	-
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.800.000,00	37.500.000,00	99,21	-
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	683.570.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	-	-	-	625.170.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	-	-	-	68.400.000,00

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 7.609.708.964,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.557.364.079,00 atau 86,17%.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Akun belanja Barang dan Jasa terdiri dari belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, belanja Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri , Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, , dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$3 \div (4 \div 3) \times 100$	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.063.727.117,00	13.790.197.765,00	85,85	21.898.511.175,00
5.1.02.01	Belanja Barang	4.378.227.207,00	3.549.880.444,00	81,08	6.654.890.274,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.378.227.207,00	3.549.880.444,00	81,08	6.654.890.274,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-	-	2.965.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	-	10.800.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	116.959.800,00	101.716.190,00	85,50	81.618.700,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	65.732.400,00	48.501.600,00	73,79	98.621.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	311.146.807,00	242.043.216,00	77,79	260.698.679,00

5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	24.219.700,00	16.927.300,00	69,89	23.314.000,00
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	-	-	3.030.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.794.000,00	3.780.000,00	99,63	25.700.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	662.000,00	621.600,00	93,90	-
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.473.000,00	5.439.300,00	99,38	19.430.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	274.374.000,00	246.630.464,00	89,89	45.275.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	376.168.000,00	372.313.200,00	98,98	14.700.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.789.200,00	55.189.280,00	98,92	83.970.000,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	-	-	-	47.756.300,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.754.815.300,00	1.306.068.794,00	74,43	4.350.713.075,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	55.650.000,00	45.550.000,00	81,85	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	843.012.000,00	618.654.400,00	73,39	620.322.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.250.000,00	214.006.800,00	99,89	749.823.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-	216.153.020,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	8.225.000,00	8.225.000,00	100,00	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	265.956.000,00	264.213.300,00	99,34	-
5.1.02.02	Belanja Jasa	2.998.908.360,00	2.498.137.072,00	83,30	2.540.457.873,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	2.963.599.320,00	2.498.137.072,00	84,29	2.307.573.873,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4.000.000,00	2.800.000,00	70,00	-
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	189.800.000,00	109.700.000,00	57,80	466.655.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.660.000,00	-	-	-
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	151.200.000,00	151.200.000,00	100,00	151.200.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	65.000.000,00	64.804.100,00	99,70	365.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	117.795.640,00	74.948.800,00	63,63	142.154.768,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	245.500.000,00	186.300.000,00	75,89	427.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	291.905.000,00	288.259.500,00	98,75	111.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	168.720.000,00	166.261.000,00	98,54	72.000.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	139.212.000,00	122.336.000,00	87,88	76.312.152,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kebersihan	-	-	-	57.609.792,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	520.800.000,00	477.950.000,00	91,77	-
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotretan	45.000.000,00	44.550.000,00	99,00	91.900.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	51.808.680,00	18.289.856,00	35,30	15.971.100,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	240.108.000,00	203.849.168,00	84,90	189.793.022,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	221.340.000,00	150.169.438,00	67,85	132.873.389,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	30.000.000,00	7.969.210,00	26,56	7.204.650,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	467.760.000,00	428.750.000,00	91,66	-
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	35.309.040,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	32.587.440,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.209.600,00	-	-	-
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.512.000,00	-	-	-
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	100.884.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-	100.884.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	132.000.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	-	-	-	120.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	-	-	-	12.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	68.860.000,00	51.420.000,00	74,67	266.866.991,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	68.860.000,00	51.420.000,00	74,67	174.551.600,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	106.571.600,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.350.000,00	19.200.000,00	89,93	21.140.000,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00	17.480.000,00	74,83	23.040.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	24.150.000,00	14.740.000,00	61,04	23.800.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	92.315.391,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	-	-	92.315.391,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.435.096.550,00	2.584.720.849,00	75,24	8.442.369.117,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.435.096.550,00	2.584.720.849,00	75,24	8.442.369.117,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	994.747.800,00	810.102.849,00	81,44	3.244.446.117,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	300.000,00	150.000,00	50,00	-
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.205.578.150,00	853.017.000,00	70,76	2.110.955.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.039.770.600,00	760.801.000,00	73,17	1.733.318.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	194.700.000,00	160.650.000,00	82,51	1.353.600.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.182.635.000,00	5.106.039.400,00	98,52	3.993.926.920,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.766.060.000,00	4.689.535.000,00	98,39	13.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perforansi	120.800.000,00	93.300.000,00	77,24	13.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.645.260.000,00	4.596.235.000,00	98,94	-
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	416.575.000,00	416.504.400,00	99,98	3.980.926.920,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	416.575.000,00	416.504.400,00	99,98	3.980.926.920,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	-
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	-
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	-
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	18.900.000,00	14.400.000,00	76,19	-

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 16.063.727.117,00 dengan realisasi sebesar Rp. 13.790.197.765,00 atau 85,85 %.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.1.2.2. Belanja Modal

Akun Belanja Modal merupakan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal tersebut meliputi Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Berikut adalah Belanja Modal SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA di Tahun 2025 dirincikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$B = (A / 3) \times 100$	5
5.2	BELANJA MODAL	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.786.000,00	68.815.000,00	62,12	90.990.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.048.000,00	-	-	43.680.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	39.048.000,00	-	-	-
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	43.680.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	71.738.000,00	68.815.000,00	95,93	47.310.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	71.738.000,00	68.815.000,00	95,93	34.060.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	-	-	13.250.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-	-	48.270.000,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	-	-	-	48.270.000,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	48.270.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	96.772.000,00	32.561.350,00	34,00	219.920.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	61.447.000,00	-	-	142.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61.447.000,00	-	-	142.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.325.000,00	32.561.350,00	94,86	77.920.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.325.000,00	32.561.350,00	94,86	77.920.000,00

Dari tabel diatas terlihat di Tahun 2024 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA telah menganggarkan Belanja Modal sebesar Rp. 206.558.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 101.376.350,00 atau 49,08 %.

5.1.2.2.1. Belanja Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, balik nama pematangan tanah sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Modal peralatan dan Mesin adalah pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya – biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Berikut rincian belanja modal peralatan dan mesin yang dilakukan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Rkening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	206.558.000,00	101.376.350,00	49,08	359.180.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.786.000,00	68.815.000,00	62,12	90.990.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.048.000,00	-	-	43.680.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	39.048.000,00	-	-	43.680.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	39.048.000,00	-	-	-
5.2.02.05.01.0006	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	43.680.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	71.738.000,00	68.815.000,00	95,93	47.310.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	71.738.000,00	68.815.000,00	95,93	34.050.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 110.786.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 68.815.000,00 atau 62,12 %.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer

Kode Rkening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
1	2	3	4	$5 = (4 / 3) \times 100$	6
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	95.772.000,00	32.561.350,00	34,00	219.920.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	61.447.000,00	-	-	142.000.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	61.447.000,00	-	-	142.000.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	34.325.000,00	32.561.350,00	94,86	77.920.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	34.325.000,00	32.561.350,00	94,86	77.920.000,00

Belanja Modal Komputer Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 95.772.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 32.561.350,00 atau 34,00%.

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tidak ada di anggaran pada Tahun 2025 oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Terbuka	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00%

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan jaringan adalah Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan yang dilakukan oleh SKPD tidak ada di anggaran pada Tahun 2025 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA pada tabel berikut.

Tabel 5.1.9
Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	(%)
Belanja Modal Jembatan Lainnya	0,00	0,00	0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp. 0,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0,00 %.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan.

5.1.3. SURPLUS/(DEFISIT) REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TA 2025 sebesar Rp. 0,00 belanja SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, sebesar Rp. 0,00 defisit sebesar Rp. 0,00%.

5.1.4. PENJELASAN POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Laporan Operasional DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2025 disajikan komparatif dengan tahun 2025 sesuai Standar Akuntansi Berbasis Akrua! berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

5.2.1. PENDAPATAN - LO

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dan telah didasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan realisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.1
Rincian Pendapatan – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024. PAD pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 0,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.2
Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah – LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2024. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA.

5.2.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipungut didasarkan atas Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah – LO pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.3
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO

URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.2. BEBAN

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau 0,00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.2.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi pada tahun 2025 terealisasi sebesar Rp. 20.742.486.218,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (8.482.565.729,00) atau (29,02) % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp. 29.225.051.947,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.4
Rincian Beban Operasi

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
		-			
8	BEBAN	20.742.486.218,00	30.683.134.016,00	(9.920.647.798,00)	(32,35)
8.1	BEBAN OPERASI	20.742.486.218,00	29.225.051.947,00	(8.482.565.729,00)	(29,02)
8.1.01	Beban Pegawai	6.770.682.741,00	7.271.376.944,00	(500.694.203,00)	(6,89)
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	13.957.403.477,00	21.953.675.003,00	(7.996.271.526,00)	(36,42)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	20.742.486.218,00	29.225.051.947,00	(8.482.565.729,00)	(29,02)
		-			
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.438.082.069,00	(1.438.082.069,00)	(100,00)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	1.242.445.391,00	(1.242.445.391,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	149.391.819,00	(149.391.819,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	27.245.059,00	(27.245.059,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	19.000.000,00	(19.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	1.438.082.069,00	(1.438.082.069,00)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN	20.742.486.218,00	30.683.134.016,00	(9.920.647.798,00)	(32,35)
		-			
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(20.742.486.218,00)	(30.683.134.016,00)	9.920.647.798,00	(32,35)

5.2.2.1.1. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp 6.770.682.741,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp (500.694.203,00) atau (6,89) % bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 7.271.376.944,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.2.5
Rincian Beban Pegawai – LO

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
5.1.01	Beban Pegawai	6.770.682.741,00	7.271.376.944,00	(500.694.203,00)	(6,89)
5.1.01.01	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.491.758,00	3.693.676.791,00	125.814.967,00	3,41
5.1.01.01.01	Beban Gaji Pokok ASN	2.892.691.500,00	2.824.261.514,00	68.429.986,00	2,42
5.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.669.446.000,00	2.824.261.514,00	(154.815.514,00)	(5,48)
5.1.01.01.01.0002	Beban Gaji Pokok PPPK	223.245.500,00	-	223.245.500,00	100,00
5.1.01.01.02	Beban Tunjangan Keluarga ASN	218.076.042,00	210.936.502,00	7.139.540,00	3,38
5.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	199.156.856,00	210.936.502,00	(11.779.646,00)	(5,58)
5.1.01.01.02.0002	Beban Tunjangan Keluarga PPPK	18.919.186,00	-	18.919.186,00	100,00
5.1.01.01.03	Beban Tunjangan Jabatan ASN	65.100.000,00	66.490.000,00	(1.390.000,00)	(2,09)
5.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	65.100.000,00	66.490.000,00	(1.390.000,00)	(2,09)
5.1.01.01.04	Beban Tunjangan Fungsional ASN	119.476.000,00	99.388.000,00	20.088.000,00	20,21
5.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	119.476.000,00	99.388.000,00	20.088.000,00	20,21
5.1.01.01.05	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	103.980.000,00	98.370.000,00	5.610.000,00	5,70
5.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	89.095.000,00	98.370.000,00	(9.275.000,00)	(9,43)
5.1.01.01.05.0002	Beban Tunjangan Fungsional Umum PPPK	14.885.000,00	-	14.885.000,00	100,00
5.1.01.01.06	Beban Tunjangan Beras ASN	135.787.500,00	132.021.660,00	3.765.840,00	2,85
5.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	120.289.620,00	132.021.660,00	(11.732.040,00)	(8,89)
5.1.01.01.06.0002	Beban Tunjangan Beras PPPK	15.497.880,00	-	15.497.880,00	100,00
5.1.01.01.07	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	55.926.687,00	28.233.420,00	27.693.267,00	98,09
5.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	55.926.687,00	28.233.420,00	27.693.267,00	98,09
5.1.01.01.08	Beban Pembulatan Gaji ASN	36.285,00	36.732,00	(447,00)	(1,22)
5.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	31.996,00	36.732,00	(4.736,00)	(12,89)
5.1.01.01.08.0002	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4.289,00	-	4.289,00	100,00
5.1.01.01.09	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	204.301.113,00	210.681.376,00	(6.380.263,00)	(3,03)
5.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	194.019.141,00	210.681.376,00	(16.662.235,00)	(7,91)
5.1.01.01.09.0002	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	10.281.972,00	-	10.281.972,00	100,00
5.1.01.01.10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	6.029.119,00	5.814.335,00	214.784,00	3,69

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.493.298,00	5.814.335,00	(321.037,00)	(5,52)
8.1.01.01.10.0002	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	535.821,00	-	535.821,00	100,00
8.1.01.01.11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	18.087.312,00	17.443.252,00	644.260,00	3,69
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	16.480.131,00	17.443.252,00	(963.121,00)	(5,52)
8.1.01.01.11.0002	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.607.381,00	-	1.607.381,00	100,00
8.1.01.02	Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.951.190.983,00	2.884.130.153,00	67.060.830,00	2,33
8.1.01.02.01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	2.913.690.983,00	2.884.130.153,00	29.560.830,00	1,02
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.913.690.983,00	2.884.130.153,00	29.560.830,00	1,02
8.1.01.02.06	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	37.500.000,00	-	37.500.000,00	100,00
8.1.01.02.06.0069	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	37.500.000,00	-	37.500.000,00	100,00
8.1.01.03	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	693.570.000,00	(693.570.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07	Beban Honorarium	-	625.170.000,00	(625.170.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	-	623.130.000,00	(623.130.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	2.040.000,00	(2.040.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08	Beban Jasa Pengelolaan BMD	-	68.400.000,00	(68.400.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	-	68.400.000,00	(68.400.000,00)	(100,00)

5.2.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 13.957.403.477,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (7.996.271.526,00) atau (36,42) % bila dibandingkan dengan Beban Barang dan Jasa tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 21.953.675.003,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Barang dan Jasa

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Penalkan / Penurunan	%
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	13.957.403.477,00	21.953.675.003,00	(7.996.271.526,00)	(36,42)
8.1.02.01	Beban Barang	3.702.452.703,00	6.703.612.446,00	(3.001.159.743,00)	(44,77)
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.695.576.253,00	6.703.612.446,00	(3.008.036.193,00)	(44,87)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	2.965.000,00	(2.965.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	7.686.000,00	(7.686.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.591.750,00	93.997.200,00	40.594.550,00	43,19

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Cetak Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	62.106.600,00	98.621.000,00	(36.514.400,00)	(37,02)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	268.098.216,00	280.696.679,00	7.399.637,00	2,84
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.927.300,00	23.314.000,00	(6.386.700,00)	(27,39)
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	3.030.000,00	(3.030.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.780.000,00	25.700.000,00	(21.920.000,00)	(85,29)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	621.600,00	-	621.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.439.300,00	19.430.000,00	(13.990.700,00)	(72,01)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	248.630.464,00	45.275.000,00	201.355.464,00	444,74
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	372.313.200,00	14.700.000,00	357.613.200,00	2.432,74
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.189.280,00	83.970.000,00	(28.780.720,00)	(34,28)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	-	47.756.300,00	(47.756.300,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(57.433.291,00)	28.663.672,00	(86.096.963,00)	(300,37)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.306.068.794,00	4.350.713.075,00	(3.044.644.281,00)	(69,98)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	45.560.000,00	-	45.560.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	749.247.900,00	620.322.000,00	128.925.900,00	20,76
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.006.800,00	749.623.500,00	(535.616.700,00)	(71,46)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakuan Dinas Harian (PDH)	-	216.153.020,00	(216.153.020,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakuan Pelatihan Kerja	8.225.000,00	-	8.225.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakuan Olahraga	264.213.300,00	-	264.213.300,00	100,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.876.450,00	-	6.876.450,00	100,00
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.995.000,00	-	4.995.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.881.450,00	-	1.881.450,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

8.1.02.02	Beban Jasa	2.496.380.525,00	2.546.899.529,00	(50.519.004,00)	(1,98)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.496.380.525,00	2.314.015.529,00	182.364.996,00	7,38
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.800.000,00	-	2.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	109.700.000,00	466.655.000,00	(356.955.000,00)	(76,49)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	151.200.000,00	151.200.000,00	-	-
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	64.804.100,00	365.200.000,00	(300.395.900,00)	(82,26)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.948.800,00	142.154.768,00	(67.205.968,00)	(47,28)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	186.300.000,00	427.200.000,00	(240.900.000,00)	(56,39)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	288.259.500,00	111.500.000,00	176.759.500,00	156,53
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	188.261.000,00	72.000.000,00	94.261.000,00	130,92
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	122.336.000,00	76.312.152,00	46.023.848,00	60,31
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Keasipan	-	57.609.792,00	(57.609.792,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	477.950.000,00	-	477.950.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Promotran	44.550.000,00	91.900.000,00	(47.350.000,00)	(51,52)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	18.342.006,00	16.196.560,00	2.145.506,00	13,26
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	202.035.871,00	193.199.279,00	8.836.592,00	4,57
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	150.173.988,00	135.683.338,00	14.490.650,00	10,66
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.969.210,00	7.204.650,00	764.560,00	10,81
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	428.750.000,00	-	428.750.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	100.884.000,00	(100.884.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-	100.884.000,00	(100.884.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	132.000.000,00	(132.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkal/Pelatihan	-	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	67.810.000,00	266.865.991,00	(199.056.991,00)	(74,59)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.810.000,00	174.551.600,00	(106.741.600,00)	(61,15)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	106.571.600,00	(106.571.600,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.000.000,00	21.140.000,00	(140.000,00)	(0,66)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	23.360.000,00	23.040.000,00	320.000,00	1,39
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.450.000,00	23.800.000,00	(350.000,00)	(1,47)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	92.315.391,00	(92.315.391,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	92.315.391,00	(92.315.391,00)	(100,00)
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.584.720.849,00	8.442.369.117,00	(5.857.648.268,00)	(69,38)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.584.720.849,00	8.442.369.117,00	(5.857.648.268,00)	(69,38)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	810.102.849,00	3.244.446.117,00	(2.434.343.268,00)	(75,03)
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	150.000,00	-	150.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	853.017.000,00	2.110.955.000,00	(1.257.938.000,00)	(59,59)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	760.801.000,00	1.733.318.000,00	(972.517.000,00)	(56,11)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160.850.000,00	1.353.650.000,00	(1.193.000.000,00)	(88,13)
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.106.039.400,00	3.993.926.920,00	1.112.112.480,00	27,85
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.688.535.000,00	13.000.000,00	4.676.535.000,00	36.973,35
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Pemompaan	93.300.000,00	13.000.000,00	80.300.000,00	617,69
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.595.235.000,00	-	4.595.235.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	415.504.400,00	3.980.926.920,00	(3.564.422.520,00)	(69,54)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	415.504.400,00	3.980.926.920,00	(3.564.422.520,00)	(69,54)

5.2.2.1.3. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan saldo Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 14.400.000,00 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 14.400.000,00 atau 100 % bila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.2.6
Rincian Beban Beban Bantuan Sosial

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.06.01	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.06.01.01	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00
8.1.06.01.01.0001	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	14.400.000,00	-	14.400.000,00	100,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Akun Beban Barang dan Jasa tahun anggaran 2025 dan 2024 terdiri dari Beban Barang Pakai Habis, beban Beban Jasa Kantor, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut.

a. Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan saldo beban persediaan periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 3.695.576.253,00 mengalami mengalami Penurunan sebesar Rp. 6.703.612.446,00 atau (44,87) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 6.703.612.446,00

Tabel 5.2.7
Rincian Beban Persediaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.01.01	Beban Barang Pakai Habis	3.695.576.253,00	6.703.612.446,00	(3.008.036.193,00)	(44,87)
8.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	2.965.000,00	(2.965.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	-	7.680.000,00	(7.680.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	10.800.000,00	(10.800.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	134.591.790,00	93.997.200,00	40.594.590,00	43,19
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	62.106.600,00	96.621.000,00	(36.514.400,00)	(37,02)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	268.098.216,00	260.898.679,00	7.399.537,00	2,84
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	16.927.300,00	23.314.000,00	(6.386.700,00)	(27,39)
8.1.02.01.01.0028	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	-	3.030.000,00	(3.030.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.780.000,00	25.700.000,00	(21.920.000,00)	(85,29)
8.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	621.600,00	-	621.600,00	100,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.439.300,00	19.439.000,00	(13.990.700,00)	(72,01)
8.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	246.630.464,00	45.275.000,00	201.355.464,00	444,74
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	372.313.200,00	14.700.000,00	357.613.200,00	2.432,74
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	55.189.280,00	83.970.000,00	(28.780.720,00)	(34,28)
8.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	-	47.756.300,00	(47.756.300,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	(57.433.291,00)	26.663.672,00	(86.096.963,00)	(300,37)
8.1.02.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.306.068.794,00	4.350.713.075,00	(3.044.644.281,00)	(69,98)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	45.550.000,00	-	45.550.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	749.247.900,00	620.322.000,00	128.925.900,00	20,78

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

8.1.02.01.01.0068	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	214.006.800,00	746.823.500,00	(535.816.700,00)	(71,45)
8.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	216.153.020,00	(216.153.020,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	8.225.000,00	-	8.225.000,00	100,00
8.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	264.213.300,00	-	264.213.300,00	100,00
8.1.02.01.04	Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	6.878.450,00	-	6.878.450,00	100,00
8.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.995.000,00	-	4.995.000,00	100,00
8.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.881.450,00	-	1.881.450,00	100,00

b. Beban Jasa

Beban Jasa adalah beban jasa yang sudah diterima selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 2.496.380.525,00 mengalami Penurunan sebesar Rp (50.519.004,00) atau (1,98)% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 2.314.015.529,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 5.2.8
Rincian Beban Jasa

Kode Rkening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.02	Beban Jasa	2.496.380.525,00	2.548.899.529,00	(50.519.004,00)	(1,98)
8.1.02.02.01	Beban Jasa Kantor	2.496.380.525,00	2.314.015.529,00	182.364.996,00	7,88
8.1.02.02.01.0001	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	2.800.000,00	-	2.800.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	109.700.000,00	468.655.000,00	(358.955.000,00)	(76,49)
8.1.02.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendermpingan	151.200.000,00	151.200.000,00	-	-
8.1.02.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	64.804.100,00	365.200.000,00	(300.395.900,00)	(82,26)
8.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	74.948.800,00	142.154.788,00	(67.205.988,00)	(47,28)
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	186.300.000,00	427.200.000,00	(240.900.000,00)	(56,39)
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	288.259.500,00	111.500.000,00	176.759.500,00	158,53
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	166.261.000,00	72.000.000,00	94.261.000,00	130,92
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	122.336.000,00	76.312.152,00	46.023.848,00	60,31
8.1.02.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Keasipan	-	57.609.792,00	(57.609.792,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0047	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	477.950.000,00	-	477.950.000,00	100,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	44.550.000,00	91.900.000,00	(47.350.000,00)	(51,52)
8.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	18.342.056,00	16.196.550,00	2.145.506,00	13,25
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	202.035.871,00	193.199.279,00	8.836.592,00	4,57

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	150.173.988,00	136.983.336,00	14.490.650,00	10,68
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	7.969.210,00	7.204.650,00	764.560,00	10,61
8.1.02.02.01.0080	Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	428.750.000,00	-	428.750.000,00	100,00
8.1.02.02.04	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	100.884.000,00	(100.884.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	-	100.884.000,00	(100.884.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	132.000.000,00	(132.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	120.000.000,00	(120.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.13.0003	Beban Bimbingan Teknis	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)

c. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan meliputi, Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Pemeliharaan Komputer, untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 67.810.000,00 mengalami Penurunan sebesar Rp(199.056.991,00) atau (74,59)% dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 174.551.600,00 Dengan rincian Sebagai Berikut :

Tabel 5.2.9
Rincian Beban Pemeliharaan

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	67.810.000,00	266.866.991,00	(199.056.991,00)	(74,59)
8.1.02.03.02	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	67.810.000,00	174.551.600,00	(106.741.600,00)	(61,15)
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	106.571.600,00	(106.571.600,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.000.000,00	21.140.000,00	(140.000,00)	(0,66)
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00	23.040.000,00	320.000,00	1,39
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.450.000,00	23.600.000,00	(350.000,00)	(1,47)
8.1.02.03.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	92.315.391,00	(92.315.391,00)	(100,00)
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	92.315.391,00	(92.315.391,00)	(100,00)

d. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 2.584.720.849,00 mengalami Penurunan Rp. (5.857.648.268,00) atau (69,38) % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 8.442.369.117,00

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.584.720.849,00	8.442.369.117,00	(5.857.648.268,00)	(69,38)
8.1.02.04.01	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.584.720.849,00	8.442.369.117,00	(5.857.648.268,00)	(69,38)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	810.102.849,00	3.244.446.117,00	(2.434.343.268,00)	(75,03)
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	150.000,00	-	150.000,00	100,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	853.017.000,00	2.110.955.000,00	(1.257.938.000,00)	(59,59)
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	760.801.000,00	1.733.318.000,00	(972.517.000,00)	(66,11)
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160.650.000,00	1.353.650.000,00	(1.193.000.000,00)	(88,13)

e. **Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat**

Beban Perjalanan Dinas adalah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp. 5.106.039.400,00 mengalami Kenaikan Rp. 1.112.112.480,00 atau 27,85 % dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp. 3.993.926.920,00

Tabel 5.2.10
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.02.05	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.106.039.400,00	3.993.926.920,00	1.112.112.480,00	27,85
8.1.02.05.01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.689.535.000,00	13.000.000,00	4.676.535.000,00	35.973,35
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Persembahan	93.300.000,00	13.000.000,00	80.300.000,00	617,69
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Komasyarakatan	4.596.235.000,00	-	4.596.235.000,00	100,00
8.1.02.05.02	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	416.504.400,00	3.980.926.920,00	(3.564.422.520,00)	(69,54)
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	416.504.400,00	3.980.926.920,00	(3.564.422.520,00)	(69,54)

5.2.2.1.4. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang sampai saat ini masih proses di Simda BMD yang dikelola Bidang Asset BPKAD Kutai Kartanegara.

5.2.2.1.5. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang merupakan saldo Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terealisasi sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2024 yang terealisasi sebesar Rp 19.557.422,00.

5.2.3. **SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**

Surplus/Defisit dari operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 defisit sebesar Rp, 0,00 mengalami Penurunan sebesar Rp, 0,00 atau 0,00 % dari Tahun 2024 sebesar Rp, 0,00.

5.2.4. **KEGIATAN NON OPERASIONAL**

Kegiatan Non Operasional pada tahun 2025 terealisasi surplus sebesar Rp.00 dan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 00% bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 surplus sebesar Rp0,00.

5.2.5. **POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa pada tahun 2025 terealisasi defisit sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.2. **Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan yang terdiri dari Saldo Akhir tahun lalu yang menjadi Saldo Awal Ekuitas, Surplus atau Defisit yang berasal dari Operasional tahun berjalan serta Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar. Laporan perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel 5.3.1
Perbandingan Nilai Ekuitas

URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL	14.428.115.325,00	15.345.877.036,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(20.742.486.218,00)	(30.663.134.016,00)
RK PPKD	21.496.419.365,43	29.745.372.305,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0
LAIN-LAIN	0	0
EKUITAS AKHIR	15.182.048.472,43	14.428.115.325,00

5.3.1. **EKUITAS AWAL**

Ekuitas Awal merupakan kekayaan bersih SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang berasal dari selisih antara asset dan kewajiban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang berasal dari tahun - tahun anggaran sebelumnya yang merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana yang terdiri dari ekuitas dana lancar,dana investasi dan dana cadangan. Saldo Ekuitas Awal 31 Desember 2025 SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang merupakan nilai akhir tahun sebelumnya sebesar Rp 14.428.115.325,00.

5.3.2. SURPLUS/DEFISIT-LO

Suplus/Defisit – LO Jumlah tersebut merupakan Saldo yang berasal dari selisih antara Pendapatan-LO dan beban selama tahun Berjalan. Saldo Suplus/Defisit – LO SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tahun 2025 sebesar Rp. (20.742.486.216,00)

5.3.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat selisih sebesar Rp 0,00 yang merupakan adanya dampak kumulatif karena koreksi yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya.

5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.4.1. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya. Saldo Aset per 31 Desember 2025 dengan nilai Aset sebesar Rp. 15.700.914.009,43 atau mengalami kenaikan sebesar Rp1.253.241.262 atau 7,98 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.447.672.747,00 yang dirinci pada tabel berikut.

Tabel 5.4.1
Perbandingan Nilai Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
ASET	15.700.914.009,43	14.447.672.747,00	1.253.241.262	7,98

Aset di Neraca terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.2
Rincian Aset

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Lancar	213.649.966,00	179.398.275,00	34.251.691,00	16,03
Investasi Jangka Panjang	0	0	0,00	0,00
Aset Tetap	13.904.308.710,43	12.685.319.139,00	1.218.989.571,43	8,77
Dana Cadangan	0	0	0,00	0,00
Aset Lainnya	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00	0,00	0,00
JUMLAH	15.700.914.009,43	14.447.672.747,00	1.253.241.262,43	

5.4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar meliputi persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset lancar SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 213.649.966,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.3
Rincian Aset Lancar

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.1	ASET LANCAR	213.649.966,00	179.398.275,00		
1.1.12	Persediaan	213.649.966,00	179.398.275,00	34.251.691,00	16,03
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	213.649.966,00	179.398.275,00	34.251.691,00	16,03
1.1.12.01.03	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	14.844.900,00	38.026.500,00	(23.181.600,00)	(156,16)
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	14.844.900,00	38.026.500,00	(23.181.600,00)	(156,16)
1.1.12.01.04	Obat-obatan	198.805.066,00	141.371.775,00	57.433.291,00	28,89
1.1.12.01.04.0002	Obat-obatan Lainnya	198.805.066,00	141.371.775,00	57.433.291,00	28,89
	JUMLAH ASET LANCAR	213.649.966,00	179.398.275,00	34.251.691,00	

5.4.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset Tetap SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 13.904.308.710,43 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.4
Rincian Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3	ASET TETAP	13.904.308.710,43	12.685.319.139,00	1.218.989.571,43	8,77
1.3.01	Tanah	2.414.331.171,43	1.381.250.000,00	1.033.081.171,43	42,79
1.3.01.01	Tanah	2.414.331.171,43	1.381.250.000,00	1.033.081.171,43	42,79
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.414.331.171,43	1.381.250.000,00	1.033.081.171,43	42,79
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.414.331.171,43	1.381.250.000,00	1.033.081.171,43	42,79
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.721.240.444,00	11.535.332.044,00	185.908.400,00	1,59
1.3.02.01	Alat Besar	5.776.000,00	5.776.000,00	-	-
1.3.02.01.03	Alat Bantu	5.776.000,00	5.776.000,00	-	-
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	3.136.000,00	3.136.000,00	-	-
1.3.02.01.03.0005	Pompa	2.640.000,00	2.640.000,00	-	-
1.3.02.02	Alat Angkutan	4.351.577.166,00	4.351.577.166,00	-	-
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	4.351.577.166,00	4.351.577.166,00	-	-
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	248.654.500,00	248.654.500,00	-	-
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	-341.000.000,00	-341.000.000,00	-	-
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	437.500.000,00	437.500.000,00	-	-
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.945.922.666,00	2.945.922.666,00	-	-
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	1.060.500.000,00	1.060.500.000,00	-	-
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	11.330.000,00	11.330.000,00	-	-
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	11.330.000,00	11.330.000,00	-	-
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	11.330.000,00	11.330.000,00	-	-
1.3.02.04	Alat Pertanian	14.688.000,00	14.688.000,00	-	-
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	14.688.000,00	14.688.000,00	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	14.688.000,00	14.688.000,00	-	-
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.404.157.660,02	2.303.924.110,02	100.233.550,00	4,17
1.3.02.05.01	Alat Kantor	1.152.200.050,00	1.115.786.500,00	36.413.550,00	3,16
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	30.680.000,00	30.680.000,00	-	-
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	459.961.000,00	421.686.000,00	38.295.000,00	8,33
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	661.539.050,00	663.420.500,00	(1.881.450,00)	(0,28)
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	975.025.271,16	911.205.271,16	63.820.000,00	6,55
1.3.02.05.02.0001	Mebel	48.755.000,00	48.755.000,00	-	-
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.125.000,00	7.125.000,00	-	-
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	422.036.950,00	358.216.950,00	63.820.000,00	15,12
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	493.148.321,16	493.148.321,16	-	-
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.960.000,00	3.960.000,00	-	-
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	276.932.338,86	276.932.338,86	-	-
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	93.395.000,00	93.395.000,00	-	-
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	23.014.000,00	23.014.000,00	-	-
1.3.02.05.03.0007	Lamari dan Arsip Pejabat	160.523.338,86	160.523.338,86	-	-
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemasar	593.551.100,00	593.551.100,00	-	-
1.3.02.06.01	Alat Studio	291.965.000,00	291.965.000,00	-	-
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	71.694.000,00	71.694.000,00	-	-
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	166.749.000,00	166.749.000,00	-	-
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	53.522.000,00	53.522.000,00	-	-
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	301.586.100,00	301.586.100,00	-	-
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	253.806.100,00	253.806.100,00	-	-
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	47.780.000,00	47.780.000,00	-	-
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	766.343.000,00	766.343.000,00	-	-
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	712.164.000,00	712.164.000,00	-	-
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	144.102.000,00	144.102.000,00	-	-
1.3.02.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	177.762.000,00	177.762.000,00	-	-
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	309.915.000,00	309.915.000,00	-	-
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	80.385.000,00	80.385.000,00	-	-
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	54.179.000,00	54.179.000,00	-	-
1.3.02.07.02.0006	Alat Kesehatan Umum Lainnya	54.179.000,00	54.179.000,00	-	-
1.3.02.08	Alat Laboratorium	16.830.000,00	16.830.000,00	-	-
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	14.740.000,00	14.740.000,00	-	-
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	14.740.000,00	14.740.000,00	-	-
1.3.02.08.03	Alat Peraga Praktik Sekolah	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	2.090.000,00	2.090.000,00	-	-
1.3.02.10	Komputer	2.684.627.767,98	2.798.952.917,98	85.674.650,00	2,97
1.3.02.10.01	Komputer Unit	2.208.616.717,98	2.155.503.217,98	53.113.500,00	2,40

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.185.166.717,98	2.132.053.217,98	53.113.500,00	2,43
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	23.450.000,00	23.450.000,00	-	-
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	676.011.050,00	643.449.700,00	32.561.350,00	4,82
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	10.912.000,00	10.912.000,00	-	-
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	427.047.700,00	427.047.700,00	-	-
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	26.230.000,00	26.230.000,00	-	-
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	211.821.350,00	179.260.000,00	32.561.350,00	15,37
1.3.02.14	Alat Bantu Eksplorasi	26.130.000,00	26.130.000,00	-	-
1.3.02.14.01	Alat Bantu Eksplorasi	26.130.000,00	26.130.000,00	-	-
1.3.02.14.01.0003	Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	26.130.000,00	26.130.000,00	-	-
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	24.530.000,00	24.530.000,00	-	-
1.3.02.15.03	Alat SAR	24.530.000,00	24.530.000,00	-	-
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong	5.780.000,00	5.780.000,00	-	-
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	18.750.000,00	18.750.000,00	-	-
1.3.02.16	Alat Peraga	621.699.750,00	621.699.750,00	-	-
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percorohan	621.699.750,00	621.699.750,00	-	-
1.3.02.16.01.0002	Alat Peraga Percorohan	621.699.750,00	621.699.750,00	-	-
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.499.333.474,00	7.499.333.474,00	-	-
1.3.03.01	Bangunan Gedung	7.107.686.414,00	7.107.686.414,00	-	-
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	7.107.686.414,00	7.107.686.414,00	-	-
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	3.283.241.595,00	3.283.241.595,00	-	-
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.625.787.483,00	2.625.787.483,00	-	-
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	327.437.336,00	327.437.336,00	-	-
1.3.03.01.01.0036	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	871.220.000,00	871.220.000,00	-	-
1.3.03.04	Tugu Titik Kontrol/Paksi	391.647.060,00	391.647.060,00	-	-
1.3.03.04.01	Tugu/Tanda Batas	391.647.060,00	391.647.060,00	-	-
1.3.03.04.01.0004	Pagar	391.647.060,00	391.647.060,00	-	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119,00	381.776.119,00	-	-
1.3.04.02	Bangunan Air	231.911.769,00	231.911.769,00	-	-
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	231.911.769,00	231.911.769,00	-	-
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	231.911.769,00	231.911.769,00	-	-
1.3.04.04	Jaringan	149.864.350,00	149.864.350,00	-	-
1.3.04.04.01	Jaringan Air Minum	35.430.550,00	35.430.550,00	-	-
1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	35.430.550,00	35.430.550,00	-	-
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	114.433.800,00	114.433.800,00	-	-
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	114.433.800,00	114.433.800,00	-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.112.372.498,00)	(8.112.372.498,00)	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.154.156.517,00)	(7.154.156.517,00)	-	-
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(7.154.156.517,00)	(7.154.156.517,00)	-	-
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(7.154.156.517,00)	(7.154.156.517,00)	-	-
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(849.687.772,00)	(849.687.772,00)	-	-
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(849.687.772,00)	(849.687.772,00)	-	-
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(849.687.772,00)	(849.687.772,00)	-	-
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(108.528.209,00)	(108.528.209,00)	-	-
1.3.07.03.01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(108.528.209,00)	(108.528.209,00)	-	-
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(108.528.209,00)	(108.528.209,00)	-	-
	JUMLAH ASET TETAP	13.904.308.710,43	12.665.319.139,00	1.218.989.571,43	8,77

5.4.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Aset Lainnya SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.582.955.333,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.4
Rincian Aset Lainnya

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.5	ASET LAINNYA	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00	-	-
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
1.5.03.01.01.0009	Aset Tidak Berwujud Lainnya	95.000.000,00	95.000.000,00	-	-
1.5.04	Aset Lain-lain	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	-	-
1.5.04.01	Aset Lain-lain	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	-	-
1.5.04.01.01	Aset Lain-lain	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	-	-
1.5.04.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	-	-
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.166.667,00)	(22.166.667,00)	-	-
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.166.667,00)	(22.166.667,00)	-	-
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(22.166.667,00)	(22.166.667,00)	-	-
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(22.166.667,00)	(22.166.667,00)	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.4.1.4. Kewajiban Jangka Pendek

Aset Kewajiban Jangka Pendek meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp 518.865.537,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.4.5
Kewajiban Jangka Pendek

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2	KEWAJIBAN	518.865.537,00	19.557.422,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	518.865.537,00	19.557.422,00
2.1.06	Utang Belanja	518.865.537,00	19.557.422,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	518.865.537,00	19.557.422,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	518.865.537,00	19.557.422,00

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah Beban utang yang terdiri Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa, Utang Belanja Jasa, Utang Belanja Pemeliharaan, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Utang Belanja Modal Komputer Sebear Rp. 518.865.537,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 5.4.6
Rincian Beban Uang Jangka Pendek

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
2	KEWAJIBAN	518.865.537,00	19.557.422,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	518.865.537,00	19.557.422,00
2.1.06	Utang Belanja	518.865.537,00	19.557.422,00
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	213.318.862,00	-
2.1.06.01.01	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.143.765,00	-
2.1.06.01.01.0017	Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS	7.143.765,00	-
2.1.06.01.02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	206.174.897,00	-
2.1.06.01.02.0001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	206.174.897,00	-
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	214.136.375,00	19.557.422,00
2.1.06.02.01	Utang Belanja Barang	179.947.500,00	-
2.1.06.02.01.0024	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.694.000,00	-
2.1.06.02.01.0025	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.605.000,00	-
2.1.06.02.01.0026	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26.055.000,00	-
2.1.06.02.01.0052	Utang Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	130.593.500,00	-
2.1.06.02.02	Utang Belanja Jasa	17.800.875,00	19.557.422,00
2.1.06.02.02.0060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	421.500,00	369.300,00
2.1.06.02.02.0061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	14.554.875,00	18.378.173,00
2.1.06.02.02.0063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.814.499,00	2.809.949,00
2.1.06.02.03	Utang Belanja Pemeliharaan	16.390.000,00	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

2.1.06.02.03.0156	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.800.000,00	-
2.1.06.02.03.0441	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit Lainnya	5.880.000,00	-
2.1.06.02.03.0444	Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Personal Computer	8.710.000,00	-
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.408.500,00	-
2.1.06.07.06	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	38.295.000,00	-
2.1.06.07.06.0004	Utang Belanja Modal Alat Kantor-Alat Penyimpan Perangkat Keras Kantor	38.295.000,00	-
2.1.06.07.10	Utang Belanja Modal Komputer	53.113.500,00	-
2.1.06.07.10.0002	Utang Belanja Modal Komputer Unit-Personal Computer	53.113.500,00	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	518.865.537,00	19.557.422,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	518.865.537,00	19.557.422,00

5.4.1.1.1.Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan lembaga setelah memperoleh penunjukan dari pejabat yang berwenang sesuai penerimaan perundang – undangan Kas di bendahara penerimaan Dinas Pengendalian Penduduk bernilai dikamarkan tahun 2025 senilai Rp. 0,00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki Bendahara Penerimaan dan tidak ada penerimaan yang diterima sampai dengan 31 Desember 2025 saldo senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

5.4.1.1.2.Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan saldo uang maka kerja berupa uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Kementerian Negara /Lembaga /satuan kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2025 memiliki Uang Persediaan/UP sebesar Rp. 320.000.000,00 sampai dengan tanggal 15 Desember 2025 transaksi GU Nihil Senilai Rp. 324.738.435,00,- sehingga terjadi STS dengan Nomor 001/2.14/DPPKB/12/2025 senilai Rp. 261.565,00,- dan saldo pada Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

5.4.1.1.3.Kas Lainnya

Kas Lainnya adalah saldo Kas atas Dana Hibah Bos yang masih ada di rekening bank Bendahara Bos hingga tanggal neraca uang jaminan (retorensi) yang di setorkan oleh pihak ketiga sebagai bentuk jaminan pemeliharaan atau perbaikan atas suatu pekerjaan yang mereka lakukan dan saldo pemotongan dan pemungutan pajak atau PFK pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai 31 Desember 2025 tidak ada saldo atau dengan Rp.0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	0,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

5.4.1.1.4. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang sah. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada Piutang Pendapatan sehingga saldo sampai dengan 31 Desember 2025 senilai Rp.0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	0,00	0,00

5.4.1.1.4.1. Piutang Retribusi

Piutang Pajak atau Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada Pemerintah Daerah atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari satu penetapan pajak atau retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam surat Tagihan Pajak Daerah, Surat tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga atau denda. Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki Piutang Retribusi.

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Retribusi	0,00	0,00

5.4.1.1.5. Piutang Lainnya

Piutang Lain-lain atau kerap kali disebut Piutang Bukan Dagang adalah jenis piutang yang tidak termasuk kedalam piutang dagang mempunyai Wesel tagihan. Adapun Jenis Piutang Lain-lain sebagai berikut: Yaitu merupakan piutang yang dibayarkan sesuai tanggal tagihan. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada Piutang lain-lain sehingga nilai saldo per 31 Desember 2025 Senilai Rp. 0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya:	0,00	0,00

5.4.1.1.6. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan pengelolaan kualitas piutang. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak ada penyisihan piutang sehingga saldo pada 31 Desember 2024 senilai Rp.0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	0,00	0,00

5.4.1.1.7. Beban Dibayar Dimuka

Beban yang dibayar dimuka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar dimuka bukan merupakan beban seluruh pada periode tersebut melainkan sebagai aktiva lancar. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024 tidak melakukan transaksi pembayaran dimuka sehingga saldo sampai 31 Desember 2025 Senilai Rp.0,00

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00

5.4.1.1.8. Persediaan

Saldo Persediaan sebesar Rp 213.649.966 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor dan Obat Kontrasepsi (Drouping BKKBN RI) per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	213.649.966	179.398.275,00

Saldo Persediaan sebesar Rp. 213.649.966 merupakan nilai persediaan alat tulis kantor dan Obat Kontrasepsi (Drouping BKKBN RI) per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.4
Rincian Persediaan

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Persediaan Alat Tulis Kantor	14.844.900	38.026.500,00	(23.181.600,00)	(156,16)
Alat dan Obat Kontrasepsi (Drouping BKKBN RI)	198.805.066	141.371.775,00	57.433.291,00	28,89
JUMLAH	213.649.966,00	179.398.275,00	34.251.691,00	16,03

5.4.1.5. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk tahun Anggaran 2023 tidak ada investasi jangka panjang begitu juga ditahun anggaran 2025

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00

5.4.1.6. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap yang disajikan sebesar Rp. 13.904.308.710,43 dan Rp. (8.112.372.498,00) merupakan nilai aset tetap SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 dan 2024 setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Rincian Aset Tetap tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.5
Rincian Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
1.3	ASET TETAP	13.904.308.710,43	12.685.319.139,00	1.218.989.571,43	8,77
1.3.01	Tanah	2.414.331.171,43	1.381.260.000,00	1.033.081.171,43	42,79
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.721.240.444,00	11.535.332.044,00	185.908.400,00	1,59
1.3.03	Gedung dan Bangunan	7.499.333.474,00	7.499.333.474,00	-	-
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119,00	381.776.119,00	-	-
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(8.112.372.498,00)	(8.112.372.498,00)	-	-
	JUMLAH ASET TETAP	13.904.308.710,43	12.685.319.139,00	1.218.989.571,43	8,77

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA telah melakukan upaya penataan Aset Daerah sejak Tahun 2012. Penataan Aset tersebut dilakukan antara lain melalui perbaikan data, inventarisasi, dan sensus untuk mengetahui kondisi terkini dan nilai Aset Tetap Daerah yang seharusnya disajikan di Neraca Daerah. Selain itu, juga dilakukan penataan ulang atas aset SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang digabung atau dipecah karena adanya perubahan organisasi dan dilakukan proses penilaian atas barang milik daerah yang memiliki nilai Rp0,00 atau Rp1,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Proses inventarisasi kekayaan daerah sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dengan mengumpulkan data dan melakukan inventarisasi fisik di lapangan untuk mencari aset-aset SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang belum terdata dalam Daftar Inventaris Daerah dan Neraca Daerah. Perbedaan nilai antara Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Daerah (BMD) pada Laporan BMD merupakan tindak lanjut atas hasil sensus dan inventarisasi data BMD yang ada. Barang Milik Daerah yang tidak memenuhi definisi aset tetap direklasifikasi pos ke aset lainnya. Reklasifikasi tersebut meliputi:

- Barang rusak berat.
- Barang hilang/musnah/dalam proses penelusuran.
- Barang yang diserahkan ke masyarakat atau pihak di luar Pemerintah Daerah tanpa Berita Acara Serah Terima.
- Barang yang harga satuannya di bawah nilai kapitalisasi.
- Barang yang dikerjasamakan.

Jika dibandingkan dengan saldo aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 13.904.308.710,43 maka nilai aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 12.685.319.139,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 1.218.989.571,43 atau 8,77 %. Uraian mengenai Aset Tetap yang dimiliki SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.3.1. Tanah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	2.414.331.171,43	1.381.250.000,00

Saldo aset tanah SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.414.331.171,43 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.381.250.000,00. Ringkasan mutasi aset tanah selama tahun 2025 tidak ada Penambahan atau pengurangan dengan sebagai berikut:

Tabel 5.4.6
Mutasi Aset Tetap – Tanah

No	URAIAN	TANAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.381.250.000
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2025 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	1.381.250.000
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2025	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	-
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	-
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALA	-
5.		-
	MUTASI TAMBAH	-
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	1.033.081.171,43
7	Reklasifikasi dan Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dan Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dan Aset Bermasalah Hasil Inventarsasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	TANAH
	2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		1.033.081.171,43
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2023 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

No	URAIAN	TANAH
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	
o	antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		2.414.331.171,43
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		2.414.331.171,43
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap tanah sebesar Rp. 2.414.331.171,43 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.7
Rincian Aset Tetap – Tanah

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.01	Tanah	2.414.331.171,43
1.3.01.01	Tanah	2.414.331.171,43
1.3.01.01.01	Tanah Persil	2.414.331.171,43
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.414.331.171,43

5.4.1.3.2. Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	11.721.240.444,00	11.535.332.044,00

Saldo aset peralatan dan mesin SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 11.721.240.444,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 11.535.332.044,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 185.908.400,00 atau 1,59%. Ringkasan mutasi aset peralatan dan mesin selama tahun 2024 sebagai berikut.

Tabel 5.4.8
Mutasi Aset Tetap - Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	11.535.332.044,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2023 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	11.535.332.044,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	101.376.350
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2025	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Tanggung Jawab Periode Tanggal 31 Desember 2025

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2025)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	91.408.500,00
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11		
12		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	91.408.500,00
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2023 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	6.876.450,00
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

No	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
	JUMLAH MUTASI KURANG	8.876.450,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 NERACA KEUANGAN	11.721.240.444,00
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD	11.721.240.444,00
	SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD	11.721.240.444,00
	SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD	
	Beban Penyusutan 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap peralatan mesin sebesar Rp. 11.721.240.444,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.9
Rincian Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	3.136.000,00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	2.640.000,00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	248.654.500,00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	(341.000.000,00)
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	437.500.000,00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.945.922.666,00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	1.060.500.000,00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	11.330.000,00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	14.688.000,00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	30.680.000,00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perengkapan Kantor	459.981.000,00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	661.539.050,00
1.3.02.05.02.0001	Mebel	46.755.000,00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	7.125.000,00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	422.036.950,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	493.148.321,16
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.960.000,00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	93.395.000,00
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	23.014.000,00
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	160.523.338,86
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	71.694.000,00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	166.749.000,00
1.3.02.06.01.0006	Alat Studio Lainnya	53.522.000,00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	253.806.100,00
1.3.02.06.02.0006	Alat Komunikasi Sosial	47.780.000,00
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	144.102.000,00
1.3.02.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	177.762.000,00
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	309.915.000,00
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	80.385.000,00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	54.179.000,00
1.3.02.08.01.0008	Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	14.740.000,00
1.3.02.08.03.0003	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	2.090.000,00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	2.185.166.717,98
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	23.450.000,00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	10.912.000,00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	427.047.700,00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	26.230.000,00
1.3.02.10.02.0005	Peralatan Komputer Lainnya	211.821.350,00
1.3.02.14.01.0003	Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	26.130.000,00
1.3.02.15.03.0001	Alat Penolong	5.780.000,00
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	18.750.000,00
1.3.02.16.01.0002	Alat Peraga Percontohan	621.699.750,00
	Jumlah	11.721.240.444,00

5.4.1.3.3. Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Gedung dan Bangunan	7.499.333.474	7.499.333.474

Saldo aset gedung dan bangunan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 7.499.333.474 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 7.499.333.474 Ringkasan mutasi aset gedung dan bangunan selama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 5.4.10
Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	7.499.333.474
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2023 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2023 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2024	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2024	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.		
	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2020 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Murni Tahun 2024)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dari OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
11		
12		
	JUMLAH MUTASI TAMBAH	
	MUTASI KURANG	
1	Koreksi Saldo Tahun 2022 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2022 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2025	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2025	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023)

No	URAIAN	GEDUNG DAN BANGUNAN
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatabel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		-
SALDO PER 30 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		7.499.333.474
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		7.499.333.474
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		
Beban Penyusutan 2023		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 (murni)		
Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi		

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp. 7.499.333.474,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.11
Rincian Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	3.283.241.595,00
1.3.03.01.01.0009	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.625.787.483,00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	327.437.336,00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	871.220.000,00
1.3.03.04.01.0004	Pagar	391.647.060,00
	Jumlah	7.499.333.474,00

5.4.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	381.776.119,00	381.776.119,00

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 381.776.119,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 381.776.119,00. Ringkasan mutasi aset jalan, irigasi dan jaringan selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.4.12
Mutasi Aset Tetap - Jalan, Irigasi, dan Jaringan

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	381.776.119,00
	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	
	Koreksi Barang dibawah nilai kapitalisasi 2024 kebawah	
	Akumulasi penyusutan 1 Januari 2024 setelah kapitalisasi	
	SALDO 1 JANUARI MENURUT NERACA SIMDA BMD	380.585.119,00
	Akumulasi Penyusutan 1 Januari 2024	
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 30 DESEMBER 2024	
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 30 DESEMBER 2024	
4.	KOREKSI-KOREKSI ATAS BELANJA MODAL/TRANSAKSI BERJALAN	
5.	MUTASI TAMBAH	
1	Koreksi Saldo Tahun 2021 Belum Diakomodir pada LKPD (Menambah)	
2	Hibah / Pendapatan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain	
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa	
4	Barang Temuan Baru (Mumi Tahun 2024)	
5	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan	
6	Mutasi Masuk dan OPD Lain	
7	Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
a	Barang Rusak Berat	
b	Barang Hilang	
c	Aset Tak Berwujud	
d	Aset P3D	
e	Aset PDAM / Tiang Pancang	
f	Aset Dikerjasamakan	
8	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Kompatabel	
a	Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
b	Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
c	Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
9	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
a	Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
b	Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
c	Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
10	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
a	antar KIB A - KIB B	
b	antar KIB A - KIB C	
c	antar KIB A - KIB D	
d	antar KIB A - KIB E	
e	antar KIB A - KIB F	
f	antar KIB B - KIB C	
g	antar KIB B - KIB D	
h	antar KIB B - KIB E	
i	antar KIB B - KIB F	
j	antar KIB C - KIB D	
k	antar KIB C - KIB E	
l	antar KIB C - KIB F	
m	antar KIB D - KIB E	
n	antar KIB D - KIB F	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
	o antar KIB E - KIB F antar KIB F - KIB C	
11		
12		
JUMLAH MUTASI TAMBAH		-
MUTASI KURANG		
1	Koreksi Saldo Tahun 2023 Belum Diakomodir pada LKPD (Mengurangi)	
2	Koreksi Double Catat	
3	Hibah Pemkab ke Pihak Lain	
4	Belanja Barang dan Jasa yang Dianggarkan Dalam Belanja Modal	
5	Belanja Modal yang Merupakan Pembayaran Hutang Tahun Sebelumnya	
6	BMD Murni Tahun 2023 dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi	
7	Barang dengan Nilai Dibawah Kapitalisasi Tambahan Dibawah Tahun 2024	
8	Pengadaan Belanja Modal Diserahkan ke Masyarakat	
9	Barang Diserahkan Ke Masyarakat Tambahan Dibawah Tahun 2024	
10	Penghapusan Aset Tetap dengan SK Penghapusan	
11	Mutasi Keluar ke OPD Lain	
12	Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
	a Barang Rusak Berat	
	b Barang Hilang	
	c Aset Tak Berwujud	
	d Aset P3D	
	e Aset PDAM / Tiang Pancang	
	f Aset Dikerjasamakan	
13	Reklasifikasi ke Aset Ekstra Kompatibel	
	a Aset Dibawah Kapitalisasi Aset Tetap	
	b Aset Dibawah Kapitalisasi Rusak Berat	
	c Aset Dibawah Kapitalisasi P3D	
14	Reklasifikasi ke Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013	
	a Barang Dalam Penelusuran Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	b Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
	c Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013	
15	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (KIB)	
	a antar KIB A - KIB B	
	b antar KIB A - KIB C	
	c antar KIB A - KIB D	
	d antar KIB A - KIB E	
	e antar KIB A - KIB F	
	f antar KIB B - KIB C	
	g antar KIB B - KIB D	
	h antar KIB B - KIB E	
	i antar KIB B - KIB F	
	j antar KIB C - KIB D	
	k antar KIB C - KIB E	
	l antar KIB C - KIB F	
	m antar KIB D - KIB E	
	n antar KIB D - KIB F	
	o antar KIB E - KIB F	
	antar KIB F - KIB C	
16		
17		
JUMLAH MUTASI KURANG		
SALDO PER 30 DESEMBER 2024 NERACA KEUANGAN		
6	ASET PDAM / TIANG PANCANG	
7	ASET P3D	
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT KERTAS KERJA OPD		381.778.119,00
SALDO PER 30 DESEMBER 2025 MENURUT SIMDA BMD		381.778.119,00
SELISIH KERTAS KERJA OPD DAN NERACA BMD		381.778.119,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023

No	URAIAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI
	Beban Penyusutan 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	
	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 (murni)	
	Koreksi Akumulasi RB/Hapus/Mutasi	

Saldo per 31 Desember 2025 aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp. 381.776.119,00 dengan rincian obyek aset sebagai berikut:

Tabel 5.4.13
Rincian Aset Tetap – Jalan, Rigasi, dan Jaringan

Koderekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119,00
1.3.04.02.04.0005	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	231.911.789,00
1.3.04.04.01.0004	Jaringan Sambungan ke Rumah	35.430.550,00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	114.433.800,00
	Jumlah	381.776.119,00

5.4.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2025
Aset Tetap Lainnya	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan lain-lain.

Saldo aset tetap lainnya SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.582.955.333,00 jika dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp. 1.582.955.333,00.

5.4.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap bersangkutan. Saldo konstruksi dalam pengerjaan pada tanggal 31 Desember 2024, sebesar Rp0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar Rp0,00.

5.4.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Akumulasi Penyusutan	(8.112.372.498,00)	(8.112.372.498,00)

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kebijakan Akuntansi Nomor 12 mengenai Aset menyebutkan bahwa Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) yang dihitung secara semesteran. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset. Nilai akumulasi penyusutan atas aset tetap kami sajikan menggunakan data yang berasal dari aplikasi SIMDA BMD.

Saldo per 31 Desember 2024 aset tetap akumulasi penyusutan sebesar Rp (8.112.372.498,00) dengan obyek aset sebagai berikut:

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.4.14
Rincian Aset Tetap – Akumulasi Penyusutan

Koderekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(7.154.156.517,00)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(849.687.772,00)
1.3.07.03.01.0003	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	(108.528.209,00)
	Jumlah	(8.112.372.498,00)

5.4.1.7. Aset Lainnya

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lainnya	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan meliputi tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Saldo Aset Lainnya sebesar Rp. 1.582.955.333,00 dan Rp. 1.582.955.333,00 adalah nilai Aset Lainnya dan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Senilai (22.166.667,00) per 31 Desember 2025 dan 2024. Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada rincian tabel berikut.

Tabel 5.4.15
Mutasi Aset Lainnya

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
Aset Tidak Berwujud Lainnya	95.000.000,00	95.000.000,00	-	0
Aset Rusak Berat/Usang	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	-	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Senilai	(22.166.667,00)	(22.166.667,00)	-	0
Jumlah	1.582.955.333,00	1.582.955.333,00	-	

5.5.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00

5.5.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00

5.5.1.4.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00

5.5.1.4.4. Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	0,00	95.000.000,00

Saldo Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 95.000.000,00 dan sebesar Rp0,00 merupakan nilai per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 berupa software dan berbagai aplikasi sistem informasi pada SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

Tabel 5.4.16
Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai Perolehan	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat	Terpakai s.d 2024	Amortisasi 2024	Beban Amortisasi	Nilai Buku 2024	Total ATR
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak erwujud-Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	000	000	000	000	000	000	000	000

5.5.1.4.5. Aset Lain-lain

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset Lain-lain	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00

Saldo Aset Lain-Lain sebesar Rp. 1.510.122.000,00 dan Rp. 1.510.122.000,00 merupakan saldo per 31 Desember 2025 dan Saldo Tahun 2024. Rincian Aset Lain-lain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4.17
Rincian Aset Lain-lain

Kode Rekening	Rincian Obyek Aset	Nilai Aset
1.5.4.01.01.0001	Aset Rusak Berat/Usang	1.510.122.000,00
	Jumlah Aset	1.510.122.000,00

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang masih harus dibayar per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 518.865.537,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang terdiri dari:

5.4.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Pendek	518.865.537,00	19.557.422,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 518.865.537,00 dan Rp. 19.557.422,00 merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 dan 2024 yang diharapkan dapat diselesaikan oleh SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5.4.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00

5.4.2.1.2. Utang Beban

	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang Beban	518.865.537,00	19.557.422,00

Saldo Utang Beban sebesar Rp. 518.865.537,00 merupakan Utang Beban SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 atas Tagihan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa WIFI/Indihome/Internet, Listrik, Tagihan Air namun Belanja Modal Peralatan dan Mesin akan direalisasikan pada tahun berikutnya. Rincian Utang Beban tersebut dalam tabel.

Tabel 5.4.18
Rincian Utang Beban

Kode Rekening	Rincian Utang Beban	Nilai utang 2025
2.1.06.01	Utang Belanja Pegawai	213.318.662,00
2.1.06.02	Utang Belanja Barang dan Jasa	214.138.375,00
2.1.06.07	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	91.408.500,00
	Jumlah	518.865.537,00

5.4.2.1.3. Utang Jangka Pendek Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Utang Jangka Pendek Lainnya	518.865.537,00	19.557.422,00

Saldo Utang Jangka pendek lainnya yang Sebesar Rp. 19.557.422,00 merupakan Utang Jangka Pendek SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2024 SKPD atas tagihan pembayaran Listrik dan Air Bulan Desember 2024 yang sudah dibayarkan Pada I tahun 2025 dengan No Bukti SP2d pembayaran 64.02/04.0/000033/GU/2.14.0.00.0.00.01.0000/P3/6/2025

5.4.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang selama Tahun 2025 dan 2024.

5.4.3. EKUITAS

	31 Desember 2025	31 Desember 20234
EKUITAS	15.182.048.472,43	14.428.115.325,00

Ekuitas merupakan kekayaan SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA yang tertanam dalam aset SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA setelah dikurangi dengan kewajiban. Nilai Ekuitas Dana SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 15.182.048.472,43 dan mengalami Kenaikan sebesar Rp. 753.933.147,43 atau 4,97 % Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.428.115.325,00

BAB VI - PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

SKPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian dari pemerintah pusat selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menyelenggarakan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah baik yang melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

BAB VII - PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pengguna Anggaran SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**, atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, dengan beberapa simpulan sebagai berikut.

- Total realisasi pendapatan – LRA tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 0,00 atau 0,00 % dan anggaran pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2025 sebesar Rp. 0,00.
- Total realisasi belanja tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 20.463.338.194,00 atau 85,62 % dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 23.898.894.081,00.
- Total realisasi pendapatan – LO tahun anggaran 2025 sebesar Rp0,00.
- Total realisasi beban tahun anggaran 2025 sebesar Rp 20.742.486.218,00
- Nilai aset yang dikuasai SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 15.700.914.009,43 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.253.241.262,43 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 14.428.115.325,00 Nilai kewajiban yang masih menjadi tanggungan SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 518.865.537,00 Mengalami kenaikan sebesar Rp. 499.308.115,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 19.557.422,00
- Nilai Ekuitas yang dimiliki SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 15.182.048.472,43 Mengalami Kenaikan sebesar Rp. 499.308.155,00 dari nilai yang disajikan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 14.428.115.325,00

Demikian laporan Keuangan SKPD **DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** Berbasis Aktual Tahun Anggaran 2025 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025.

Tenggarong, 31 Desember 2025

Pengguna Anggaran,

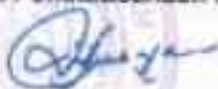

DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si.
NIP.197009241990031001

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN BARANG AKHIR TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	810.102.849,00
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	150.000,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	853.017.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	760.801.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160.650.000,00
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Perjadin	2.584.720.849,00
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	810.102.849,00
8.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	150.000,00
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	853.017.000,00
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	760.801.000,00
8.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160.650.000,00
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Perjadin	2.584.720.849,00
	Selisi Perhitungan Beban Perjadin	-
	Jurnal Pembayaran Utang Perjadin TA 2024	-
	Jurnal Pengakuan Utang Perjadin TA 2025	-
	Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Koreksi Beban Perjadin Tambah/(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Jumlah Selisi	-
	Selisi Perhitungan	-

Tenggarong 31 Desember 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan



Hennie Asfyanie, SE, M.Si
NIP. 19681013199903 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN BARANG AKHIR TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	93.300.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.596.235.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	416.504.400,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Masyarakat/Hadiah	5.106.039.400,00
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	93.300.000,00
8.1.02.05.01.0004	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.596.235.000,00
8.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	416.504.400,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Masyarakat/Hadiah	5.106.039.400,00
	Selisih Perhitungan Beban Masyarakat/Hadiah	-
	Jumlah Pembayaran Utang Masyarakat/Hadiah TA 2024	-
	Jumlah Pengakuan Utang Masyarakat/Hadiah TA 2025	-
	Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Koreksi Beban Masyarakat/Hadiah Tambah/(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Jumlah Selisih	-
	Selisih Perhitungan	-

Tenggarong 31 Desember 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Hennie Asfyanie, SE, M.Si
NIP. 19681013199903 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN BARANG AKHIR TAHUN 2025
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

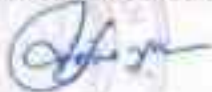
Kode Rekening	Uraian Rekening	Nilai
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	19.200.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	17.480.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	14.740.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Belanja Pemeliharaan	51.420.000,00
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	21.000.000,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.360.000,00
8.1.02.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	23.450.000,00
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	0	-
	Jumlah Beban Pemeliharaan	67.810.000,00
	Selisih Perhitungan Beban Pemeliharaan	16.390.000,00
	Jurnal Pembayaran Utang Pemeliharaan TA 2024	-
	Jurnal Pengakuan Utang Pemeliharaan TA 2025	16.390.000,00
	Koreksi Persediaan Tambah(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Koreksi Beban Pemeliharaan Tambah(Kurang) TA 2025	-
	Mutasi Tambah TA 2025	-
	Mutasi Kurang TA 2025	-
	Jumlah Selisih	16.390.000,00
	Selisih Perhitungan	-

Tenggarong 31 Desember 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan


Hennie Asfyanie SE, M.Si
NIP. 19581013199903 2 007

Jumlah Beban Barang	2.496.380.525,00
Selisih Perhitungan Beban Jasa	- 1.756.547,00
Jurnal Pembayaran Utang Jasa TA 2024	- 19.557.422,00
Jurnal Pengakuan Utang Jasa TA 2025	17.800.875,00
Koreksi Persediaan Tambah/(Kurang) TA 2025	
Mutasi Tambah TA 2025	
Mutasi Kurang TA 2025	
Koreksi Beban Jasa Tambah/(Kurang) TA 2025	
Mutasi Tambah TA 2025	
Mutasi Kurang TA 2025	
Jumlah Selisih	- 1.756.547,00
Selisih Perhitungan	-

Tenggarong 31 Desember 2025
Pejabat Penatausahaan Keuangan



Hennie Asfyanie, SE, M.Si
NIP. 19681013199903 2 007

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KERTAS KERJA BEBAN BARANG AKHIR TAHUN 2025

[illegible]



PEMERINTAH KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

BERITA ACARA

Nomor : 12/LAP-BEND/OPPKB/12 /2025

TENTANG
REKONSILIASI REKENING KAS TITIPAN PAJAK
PADA OPD DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KEWLUARGA BERENCANA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGRA

Pada hari ini : Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Lima, saya
antara bendahra pengeluaran OPD pihak Bankkaltimara sebagai rincian berikut :

No	Uraian Jenis Pajak	Buku Pembantu Pajak	Saldo Rekening Titipan Pajak	Selisih
1	PPH Ps.21			
2	PPH Ps.22			
3	PPH Ps.23			
4	PPN			
5	Pajak Catring/PPD			
	Jumlah	-	-	

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong 31 Desember 2025

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Hj. Hennie Asfivanie, SE., M.Si
NIP. 19681013 199903 2 007

Bendahara Pengeluaran

Nasrudin, N. SE
NIP.19770106 200701 1 016

Mengetahui
Pengguna Anggaran

Dafin Harvanto, S.Sos., M.Si
NIP.19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

BERITA ACARA REKONSILIASI KAS

Pada hari ini : Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasarudin.N.SE
NIP : 19770106 200701 1 016
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Berdasarkan Ketetapan Bupati Kutai Kartanegara 8/SK-BUP/HK/2025, TANGGAL 8 JANUARI 2025 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran, melakukan Rekonsiliasi Kas dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan / Realisasi SP2D				Rp	20.463.599.759
- UP	1	Rp	325.000.000		
- GU	44	Rp	1.078.965.447		
- TU	4	Rp	-		
- LS	11	Rp	19.059.634.312		
Jumlah		Rp	20.463.599.759		
2. Pengeluaran / Realisasi Belanja				Rp	20.463.338.194
- GU	2	Rp	1.403.703.882		
- TU	1	Rp	-		
- LS	1	Rp	19.059.634.312		
Jumlah		Rp	20.463.338.194		
Sisa UYHO				Rp	261.565
3. Sisa (STS)				Rp	-
- Gantu Uang (GU)	1	Rp	-		
- Tambahan Uang (TU)	1	Rp	-		
- Belanja Langsung (LS)	1	Rp	-		
- Uang Persediaan (UP)	1	Rp	-		
Jumlah		Rp	-		
4. Penjelasan Saldo Kas di Bendahra				Rp	-
- Saldo Buku Kas		Rp	-		
- Panjar PPTK/SP1 Belum GU		Rp	-		
		Rp	-		
Selisih		Rp	-		

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi Kas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dede Hartono, S.Sos, M.Si
NIP. 19700924 199003 1 001

Tenggarong 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran


Nasarudin N. SE
NIP. 19770106 200701 1 016



BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini : Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran

Sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah

Nomor : 59 Tahun : 2007, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap : Nasarudin, N. SE
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Berdasarkan Keputusan Bupati NOMOR 8/SK-BUP/HK/2025, TANGGAL 8 JANUARI 2025 ditugaskan mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :

Jumlah uang yang kami hitung dihadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas	= Rp.	-
b. Uang Logam	= Rp.	-
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang	= Rp.	-
belum dicairkan	= Rp.	-
d. Saldo Bank	= Rp.	-
e. Surat/Barang/Benda berharga yang	= Rp.	-
diizinkan /Panjar PPTK		
Jumlah	= Rp.	-

Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,	= Rp.	-
register dan lain sebagainya berjumlah		
Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan	= Rp.	-
Saldo buku		


Pengguna Anggaran
Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP.19730924 199003 1 001

Tenggarong 31 Desember 2025

Bendahara Pengeluaran


Nasarudin, N. SE
NIP.19770106 200701 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jendral Sudirman No. 02 Kel. Melayu Kecamatan Tenggarong

REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal Penutupan Kas : 31 Desember 2025
Nama Penutup Kas : Dafip Haryanto, S.Sos.,M.Si
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 28 November 2025
Jumlah Transaksi s/d bulan : Desember
- Jumlah Penerimaan s/d tanggal : Rp. 20.463.599,759
- Jumlah Pengeluaran s/d tanggal : Rp. 20.463.338,194
Saldo Buku : Rp. 261,565
Saldo Kas : Rp. -

Terdiri atas :

1 Uang Kertas
Pecahan Rp. 100,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 50,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 20,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 10,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 5,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 1,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 500 = 0 Lembar = Rp. -

2 Uang Logam
Pecahan Rp. 1,000 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 500 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 200 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 100 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 50 = 0 Lembar = Rp. -
Pecahan Rp. 25 = 0 Lembar = Rp. -

Sejumlah =

3 Kertas berharga dan bagian kas yang diizinkan ordonasi/SP2D, Wesel, Cek, Saldo Bank, Materni, dan Sebagai nya.....
Saldo rek Koran (Bendahra Pengeluaran) Rp. -
Saldo rek Koran Titipan Pajak Rp. -
Saldo rek BPP Rp. -
SPI Belum Jadi GU Rp. -
Rp. -
Jumlah Rp. -
Perbedaan Positif/Negatif

4 Penjelasan perbedaan baik positif maupun negatif :



Tenggarong 31 Desember 2025
Bendahra Pengeluaran

NIP.19770620020101016



BUKU KAS UMUM

SKPD

Periode : 02 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
		Saldo Sebelumnya	Rp15.205.215.894,00	Rp15.230.202.488,00	Rp25.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Belanja paket meeting 141 day kegiatan pertemuan implementasi program pemda kependudukan di sekitar jenjang SD/SM/SMN di Hotel gran Fatma Tanggering	Rp15.714.000,00	Rp0,00	Rp25.947.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Belanja paket meeting 141 day kegiatan pertemuan implementasi program pemda kependudukan di sekitar jenjang SD/SM/SMN di Hotel gran Fatma Tanggering	Rp0,00	Rp15.714.000,00	Rp25.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pelayanan MKUP di kec. Tanggering Selatan dari Kuts Bangun sesuai EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp10.748.250,00	Rp0,00	Rp35.821.388,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pelayanan MKUP di kec. Tanggering Selatan dari Kuts Bangun sesuai EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp0,00	Rp10.748.250,00	Rp35.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pertemuan rapat koordinasi TPMS Kabupaten sesuai Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp12.852.300,00	Rp0,00	Rp47.925.438,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pertemuan rapat koordinasi TPMS Kabupaten sesuai Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp0,00	Rp12.852.300,00	Rp47.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pertemuan ke lapangan di balai penyuluhan KB sesuai nomor Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp04.107.790,00	Rp0,00	Rp51.180.819,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pertemuan ke lapangan di balai penyuluhan KB sesuai nomor Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last BOKS DAK Non-Fisk	Rp0,00	Rp04.107.790,00	Rp50.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran paket meeting fullboard an. PT. Hotel EB Tanggering Nomor Invoice : INV00219WGE-00/2025 tanggal 3-4 Oktober 2025	Rp08.273.000,00	Rp0,00	Rp58.346.138,00
02-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1715,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (01/Des/2025)	Pembayaran paket meeting fullboard an. PT. Hotel EB Tanggering Nomor Invoice : INV00219WGE-00/2025 tanggal 3-4 Oktober 2025	Rp0,00	Rp08.273.000,00	Rp50.073.138,00
02-Desember 2025	94.02/06.0/0001/1/UP/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (02/Des/2025)	Belanja pembelian dan pemasangan balok kegiatan Momenun Hargenak dan Rut ASN 2025	Rp0,00	Rp2.840.000,00	Rp47.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1825,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengumpul Data Statistik Seksual Daerah Tahun 2025	Rp12.823.490,00	Rp0,00	Rp60.256.628,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1825,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja Makan dan Minum Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengumpul Data Statistik Seksual Daerah Tahun 2025	Rp0,00	Rp12.823.490,00	Rp47.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1845,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pelaksanaan kegiatan Hargenak ke 32 tingkat Provinsi Kaltim di Kalt. Nukar sesuai surat pesanan nomor sesuai nomor Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last	Rp08.030.000,00	Rp0,00	Rp55.463.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1845,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Pembayaran rekening dan rekening pelaksanaan kegiatan Hargenak ke 32 tingkat Provinsi Kaltim di Kalt. Nukar sesuai surat pesanan nomor sesuai nomor Surat Pesanan EP- 01H0EC29B0PFEW2H1C1F0SPVMT-AD01 an. CV. Linkey Last	Rp0,00	Rp08.030.000,00	Rp47.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1865,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja Pengkutan , Belanja Photo Copy dan Belanja Benda Pse (Materi) Untuk Dokumen Rerata 2025-2028. Rerata, F2PH dan LPD Tahun 2025	Rp21.371.780,00	Rp0,00	Rp68.804.918,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1865,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja Pengkutan , Belanja Photo Copy dan Belanja Benda Pse (Materi) Untuk Dokumen Rerata 2025-2028. Rerata, F2PH dan LPD Tahun 2025	Rp0,00	Rp21.371.780,00	Rp47.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1875,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja paket meeting fullboard kegiatan pengkutan barang milik daerah di Hotel Harris Samarinda tanggal 14-17 November 2025 sesuai Invoice nomor T18NM3801	Rp03.000.000,00	Rp0,00	Rp50.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1875,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja paket meeting fullboard kegiatan pengkutan barang milik daerah di Hotel Harris Samarinda tanggal 14-17 November 2025 sesuai Invoice nomor T18NM3801	Rp0,00	Rp03.000.000,00	Rp47.433.138,00
03-Desember 2025	94.02/04.0/0001/1875,5/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/0025 (03/Des/2025)	Belanja paket meeting fullboard kegiatan singkronisasi dan harmonisasi rencana pengkutan dana DAK Sub Bidang KB	Rp04.000.000,00	Rp0,00	Rp51.433.138,00



VERTICAL AND HORIZONTAL ALIGNMENT OF THE PERMANENT

Source: 2004 U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts.

Tadama Argentina S.A.

© 2006 by The Authors
Journal compilation © 2006 by Blackwell Publishing Ltd

© 1999 by John Wiley & Sons, Inc.

Subject: Quantitative

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman No. 02 Website : <https://dp2kb.kutai.kab.go.id>

E-mail : dp2kb.kutai@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Pada Hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami selaku Pejabat Pengelola Keuangan OPD yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dafip Haryanto, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl.Jendral Sudirman No. 02 Kel.Melayu Kec.Tenggarong
2. Nama : Hennie Asfyanie,SE.,M.Si
Jabatan : Kasubbag. Penyusunan Program dan Keuangan Selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan
Instansi : Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
Alamat : Jl.Jendral Sudirman No. 02 Kel.Melayu Kec.Tenggarong

Berkenaan dengan tidak terealisasinya dan terselesaikannya pembayaran kegiatan-kegiatan pada Tahun 2025, maka saya selaku Kepala OPD dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD menyatakan bahwa terdapat Kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 518.865.537,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Rp	-
2. Utang Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	-
3. Utang Belanja	Rp	427.457.037,00
a. Utang Belanja Pegawai	Rp	213.318.662,00
b. Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp	214.138.375,00
4. Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	91.408.500,00
a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD	Rp	-
b. Utang Pengadaan Aset Tetap	Rp	91.408.500,00
JUMLAH	Rp	518.865.537,00

Terhadap kewajiban jangka pendek tersebut telah dilakukan verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan dan/atau kebenaran data kewajiban jangka pendek tersebut, kami bersedia menanggung segala konsekuensi yang timbul.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab mutlak ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pengguna Anggaran,

Dafip Haryanto, S.Sos.,M.Si
NIP. 197009241980031001

PPK

Hennie Asfyanie,SE.,M.Si
NIP.196810131999032007

PT. BEO MATAK KALIMA
BEO CAME : KUDER CAME TENGKONG
KPR : BANG CEF 201 18
ALAMAT : BEO SARANGKA

27-01-2026 14:19:50
KALIMAH : 0001
USER ID : KMD000004
KMD USER : IIF

REKOR : 01120560712000
KMD REPORING : 0040000100
PISID : 01-201-20000/0 27-201-2000

SLAFER : 0.00
BMT DEBIT : 0.00
L386.79900

DATE	REKORING TANGGAL	KODE REPORING	NOMOR DEBIT	NOMOR KREDIT	SLIP
31-12-25	SLIP 0001	3/7			0.00
31-12-25	TOTAL		0.00	0.00	0.00


PT. BEO MATAK KALIMA
ANDIKA TUGETA HERNI

REKAPITULASI NILAI UTANG PER 31 DESEMBER 2025
(DINAS PENGANDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)

NO	URAIAN	SALDO AWAL (NILAI UTANG AUDITED 2024)	MUTASI KURANG (REALISASI PEMBAYARAN UTANG TA. 2024)	SISA UTANG TA. 2024	SISA UTANG TA. 2024 YANG MASIH DITAGIHKAN DI TA. 2025	MUTASI TAMBAH (UTANG TA. 2025)	JUMLAH
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	-	-	-	-	-	-
2	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	-	-	-	-	-	-
3	Utang Belanja	19.557.422,00	19.557.422,00	-	-	427.457.037,00	427.457.037,00
	a. Utang Belanja Pegawai	-	-	-	-	213.318.662,00	
	b. Utang Belanja Barang dan Jasa	19.557.422,00	19.557.422,00	-	-	214.138.375,00	
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-	-	91.408.500,00	91.408.500,00
	a. Utang Kelebihan Pembayaran PAD						
	b. Utang Pengadaan Aset Tetap					91.408.500,00	
		19.557.422,00	19.557.422,00	-	-	518.865.537,00	518.865.537,00

Tenggarong, 31 Desember 2025

Ptj Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara



Delfi Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197009241990031001

[illegible]

Terminology: 31 December 2029

FF Macbetha Duvall

Himpunan Pemuda dan Keluarang Borneo
Kebudayaan Malar Kalimantan

Dr. G. P. Hargrave, 5505 N. 21st
Ave., #170, Scottsdale, AZ 85255

Keterampilan berpolitik

- Nomor urut
- Nama SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang diibaratkan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TPHP, uang makan dll
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah)
- Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025
- Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025
- Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025
- Nilai utang akhir Desember 2025 setelah dilakukan pembayaran
- Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Pegawai Selama Tahun Anggaran 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp) Utang	Pembayaran di TA 2025			Nilai Utang per 31 Desember 2025	Keterangan	
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n (j-m)	o	
1	DPPKB	2025	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan ASN	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2025	DPPKB				208.174.897,00				208.174.897,00		
2	DPPKB	2025		Utang Makan PNS Bulan Desember 2025	DPPKB										
3	DPPKB	2025		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	DPPKB					7.143.765,00				7.143.765,00	
									213.318.662,00				213.318.662,00		

Tenggarong, 31 Desember 2025
Plt Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara



Galih Haryanto, S.Sos., M.Bi
NIP. 197009241990031001

Keterangan pengisian

- a. Nomor urut.
- b. Nama SKPD yang bersangkutan.
- c. Tahun Anggaran terjadinya utang.
- d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang.
- e. Jenis belanja pegawai yang terkait, misalnya gaji pokok, TDP, uang makan dll.
- f. Nama pegawai yang seharusnya menerima.
- g. NIP pegawai yang seharusnya menerima.
- h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas.
- i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas.
- j. Nilai pembayaran seharusnya (dalam rupiah).
- k. Nomor SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025.
- l. Tanggal SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025.
- m. Nilai SP2D pembayaran utang kepada pegawai pada TA 2025.
- n. Nilai utang akhir Desember 2025 setelah dilakukan pembayaran.

Rekapitulasi Nilai Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Non Rekanan Audit Tahun 2024
Dinas Pengendalian Perilaku dan Kelangkaan Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penerima		Dasar Pembayaran		Nilai (Rp) Utang	Pembayaran di TA 2025			Nilai Utang per 31 Desember 2025	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal SK/ST		No. SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D (Rp)		
1	DPMKB	2024	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Belanja Air	DPMKB				369.300,00				369.300,00	
				Belanja Listrik	DPMKB			64.03/04.00000033/03/27 14.0.00.0.00.01.00000P 3/5/2025	16 Jun 2025	16.376.422,00	16.376.173,00			
				Belanja Internet	DPMKB					2.809.949,00	2.809.949,00			
													16.376.422,00	

Tenggarong, 31 Desember 2025
pt Kepala Dinas
Pengendalian Perilaku dan Kelangkaan Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Dafin Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197006241990031001

- Keterangan pengisian:
- a. Nomor urut
 - b. Nama SKPO yang bersangkutan
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
 - e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
 - f. Nama pegawai yang membelanjanya menerima
 - g. NIP pegawai yang membelanjanya menerima
 - h. Nomor dasar pembayarannya misalnya surat Keputusan atau Surat Tugas
 - i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya surat Keputusan atau Surat Tugas
 - j. Nilai pembayaran sebenarnya (dalam rupiah)
 - k. Nomor SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2025
 - l. Tanggal SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2025
 - m. Nilai SP2D pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa non rekanan pada TA 2025
 - n. Nilai utang akhir Desember 2025 setelah dilakukan pembayaran
 - o. Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa Non Rekanan Selama Tahun Anggaran 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	SKPD	Tahun Anggaran	Nama Kegiatan	Jenis Belanja	Nama Penetima			Dasar Pembayaran		Nilai Utang per 31 Desember 2025	Keterangan
					Nama	NIP	No. SK/ST	Tanggal	SK/ST		
1	DPPKB	2025	Penyenggaraan Administrasi Perkantoran	Belanja Air	DPPKB					421.500,00	
				Belanja Listrik	DPPKB					14.564.876,00	
				Internet	DPPKB					2.814.496,00	
										17.800.876,00	

Tenggarong, 31 Desember 2025
Plt Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara


Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197009241990031001

- Keterangan pengisian:
- a. Nomor urut
 - b. Nama SKPD yang bersangkutan
 - c. Tahun Anggaran terjadinya utang
 - d. Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
 - e. Jenis belanja barang yang terkait, misalnya honor kegiatan, perjalanan dinas dll.
 - f. Nama pegawai yang seharusnya menerima
 - g. NIP pegawai yang seharusnya menerima
 - h. Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - i. Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
 - j. Nilai utang pembayarannya (dalam rupiah)
 - k. Keterangan

Rekapitulasi Penambahan Nilai Utang Belanja Barang Dan Jasa oleh Rekanan Selama Tahun Anggaran 2025
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	SPKD	Tahun Anggaran	Nama Rekanan	Nama Kegiatan/Detail Aktivitas	Kontak (Mendagri)		Kontak (Kartanegara)		Tanggal	Nama	Tanggal	No. SPKD	Perhitungan 31.12.2025		Nilai (Rp)	Kategori	Pembayaran
					No. HP	Tanggal	No. HP	Tanggal					No. SPKD	Tanggal			
1	DPHMB	2025	PT. SIKATIL NAGGA BORNEO	Hongdalan Alat Tula Kantor	02201111111111111111	17 November 2025	49 354 000.00	28 November 2025	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	28 November 2025	49 354 000.00	49 354 000.00	49 354 000.00
2	DPHMB	2025	CV. MN Muti Sentra	Kontribusi Kontribusi Belanja Makanan dan Minuman Rayon Bidang KAL	01111111111111111111	1 Juli 2025	125 348 900.00	28 November 2025	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	28 November 2025	125 348 900.00	125 348 900.00	125 348 900.00
3	DPHMB	2025	CV. Bai Komputer	Perbaikan dan Merakit (Perbaikan AC, Laptop dan Printer)	01111111111111111111	10 Juni 2025	88 770 000.00	28 November 2025	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	28 November 2025	88 770 000.00	88 770 000.00	88 770 000.00
4	DPHMB	2025	CV. Limas Lata	Belanja makanan dan minuman (Bakul)	01111111111111111111	20 September 2025	110 301 215.00	28 November 2025	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	02201111111111111111	28 November 2025	28 November 2025	110 301 215.00	110 301 215.00	110 301 215.00

Tenggarong, 21 Desember 2025
Puji Kurnia Dines
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kutai Kartanegara

Qatir Kurnia Dines, S.Kom, M.Si
NIP. 1970001119900310011

Keterangan pengisian:
a. Nomor urut
b. Nama SPKD yang bersangkutan
c. Tahun Anggaran kegiatan/utang
d. Nama rekanan/pemodal
e. Nama kegiatan yang dilaksanakan sesuai kontrak dan memuat detail utang
f. Nomor kontrak atau jika ada akan tertera di atas dengan tertera lokasi
g. Tanggal kontrak atau jika ada akan tertera di atas dengan tertera lokasi
h. Nilai kontrak atau jika ada akan tertera di atas dengan tertera lokasi
i. Nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)
j. Tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST)
k. Nomor SPKD pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA. 2025
l. Tanggal SPKD pembayaran utang Belanja Barang dan Jasa kepada rekanan pada TA. 2025
m. Nilai utang atau Desember 2025 sesuai dengan pengisian
n. Keterangan

[illegible]

Termination: 31 December 2025

Prof. K. K. K. K. K.

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kecamatan Kuta Kartanegara

Datta Haryanto, S.Sc., M.Si.

NIP 197006241920031001

Keterampilan pengajaran

- Netto urut
- Nilai SKPD yang bersangkutan
- Tahun Anggaran terjadinya utang
- Kegiatan yang dilaksanakan dan menimbulkan utang
- Jenis belanja barang yang terkurir, misalnya honor kegiatan dll
- Nama pegawai yang seharusnya menerima
- NIP pegawai yang seharusnya menerima
- Nomor dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Tanggal dasar pembayarannya misalnya melalui Surat Keputusan atau Surat Tugas
- Nilai utang pembayaran seluruhnya (dalam rupiah)
- Pencatatan sesuai KIB di Sinda BMD dan Rincian Asat (contoh : KIB B : Peralatan Periferal Computer)
- Keberhasilan



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
REGISTER STS
PERIODE: 01 Desember 2025 s.d 31 Desember 2025

No.	Tanggal STS	Nomor STS	Unit SKPD	Nama Penyeter	Keterangan	Jenis STS	Nilai (Rp)
1	10 Desember 2025	64.0206.0/000011/KP- /NHL/2:14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pengambilan Sisa Uang Pembelian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025	UP	Rp281.565,00
TOTAL							Rp281.565,00

Tenggarong, 31 Desember 2025
BENDAHARA PENGELUARAN


NASARUDIN N. S.E.
197701062007071016



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Jenderal Sudirman No. Telp. 0541- Fax: 0541-
T E N G G A R O N G

REGISTER SURAT TANDA SETORAN (STS)

No	Tanggal	No STS	Kode Jenis Setoran	Uraian	Nilai STS	Keterangan
1	15 Desember 2025	0001/2.14/DPPKB/12/2025	GU Nihil	Pengembelan STS GU Nihil Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	261.565,00	GU Nihil
Jumlah					261.565,00	

Tenggarong, 11 Desember 2025

Mengetahui
Plt. Kepala Dinas

Dittd. Haryanto S. Sos., M.Si
NIP.19700924 1990033 1 001

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Surat Tanda Setoran (STS)
Tahun Anggaran 2025

Unit SKPD : 2.14.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Nomor STS : 64.02/06.0/000001/UP-NIHL/2.14.0.00.0.00.01.0000/PR/12/2025
Harap diterima uang sebesar : Rp261.565,00
(Dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam puluh lima rupiah)

Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197009241990031001

BENDAHARA PENGELUARAN



NASARUDIN N. S.
NIP. 197701062007011016

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGERA		SURAT TANDA SETORAN (STS)		Waktu Setor/Waktu Bayar/Bendahara Sebagai Bukti Setoran										
1. Nomor STS		001/2.14/DPKKB/12/2025												
2. Bank Penerima		Bank Kaltim Cabang Tenggarong												
3. Nama / Nomor Rekening Bank		REK. PENERIMAAN DAERAH KUKAR <table border="1" style="display: inline-table;"><tr><td>0</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>9</td></tr></table>			0	0	4	1	3	0	0	0	1	9
0	0	4	1	3	0	0	0	1	9					
4. Penyetor		BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PP DAN KB												
5. NO SKPD/KODE SETORAN/TAHUN		KODE SKPD :	KODE JENIS SETORAN :	TAHUN KEGIATAN :										
		<table border="1"><tr><td>2.14</td></tr></table>	2.14	<table border="1"><tr><td>PUP1</td></tr></table>	PUP1	<table border="1"><tr><td>2025</td></tr></table>	2025							
2.14														
PUP1														
2025														
6. Harap Menerima Uang Sebesar (dengan huruf)		Rp 261.565.00 Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah												
7. Program		-												
8. Kegiatan		-												
9. Keterangan		Pengembalian Sisa Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2025												
No.	KODE PROG./KEG./REK.	URAIAN BELANJA		JUMLAH										
1	-	Pengembalian Sisa Uang Persediaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA. 2025		261.565.00										
JUMLAH				261.565.00										
 Mengesahkan Petinggi Keuangan Datta Haryanto S.Sos. M.Si. NIP. 197009164390001001		Penyetor, Bendahara  Naserudin N. SE NIP. 197701062007011016		Tenggarong, 15 Desember 2025 Yang Menerima  FIRM DINA A										
Keterangan Pengisian formulir Surat Tanda Setoran (STS) : 1. Disi Penomoran surat dan masing-masing SKPD 2. Disi Nama Bank penerima (Bank Kaltim Cabang Tenggarong Kaltim) 3. Disi Nama dan Nomor Rekening Kas penerima (cukup jelas) 4. Disi Nama Penyetor 5. Disi Nomor Kode SKPD (sarpa stik), Nomor Kode Setoran dan Tahun Kegiatan 6. Disi Jumlah Uang dengan angka dan huruf 7. Disi Nama Program Kegiatan (khusus pengembalian atas belanja) 8. Disi Nama Kegiatan (khusus pengembalian atas belanja) 9. Disi uraian penjelasan penyetoran 10. Disi Kode Program, Kegiatan dan Rekening Belanja, Uraian dan Jumlah yang di setor khusus pengembalian Tambahan Uang Persediaan, diisi kode program dan kegiatan saja khusus pengembalian Uang Persediaan, diisi kode 1.1.101.01/Kas di Kan Daerah 11. Disi Tanggal, bulan, tahun pada saat penyetoran, diketahui PA/KPA (nama, NIP, di tat dan stempel), penyetor (nama, NIP, di tat)														

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ATAS BELANJA MODAL

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	PEKERJAAN			PAGU DANA	BOBOT	ANGGARAN			SISA DANA (S-10) (Rp.)	SUMBER DANA	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI (%)			REALISASI KEBERHASILAN		PERTIMBANGAN			
									RP.	%	FSR %			RELU %
1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	11	11	11		
1.2	1.2.02	BELANJA MODAL												
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Kab. Badak Kutaringga, Samudra Kecamatan, Samudra Kabupaten	31 Unit	24	100,00	104.773.000,00	100,00	101.356.350,00	96,74	100	96,74	3.416.650,00	APBD
		Belanja Modal Alat Rumah Tangga												
1.2.02.01	1.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga												
1.2.02.01.01.0004	1.2.02.01.01.0004	Belanja Modal Alat Pendingin												
		AC Split Spesifikasi: 1 PK		7 Unit	7	100,00	42.346.000,00	41,01	42.000.000,00	97,75	100	97,75	966.000,00	DBH
		AC Split Spesifikasi: 2 PK		2 Unit	2	100,00	23.502.000,00	22,43	21.800.000,00	92,76	100	92,76	1.702.000,00	DBH
		Kipas Angin Spesifikasi: Ceiling Auto Fan		5 Unit	5	100,00	5.276.000,00	5,09	4.995.000,00	94,79	100	94,79	275.000,00	DBH
1.2.02.10	1.2.02.10	Belanja Modal Komputer												
1.2.02.10.02	1.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer												
1.2.02.10.02.0001	1.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya												
		Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya												
		Pengadaan Printer		7 Unit	7	100,00	30.547.000,00	28,54	30.679.900,00	99,14	100	99,14	267.100,00	DBH

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KELUANGAN ATAS BELANJA MODAL
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE REKENING	URAIAN	LOKASI	PERIKSAAN			ANGGARAN						SUMBER DATA	
				TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI (%)	PAGU DASAR	BOROP	REALISASI KEBANGGAAN		TERPERBAIK			SISA DANA (Rp.)
									(Rp.)	%	RISIKO %	KEU %		
3	2	3	6	5	9	7	8	3	10	3.1	3.2	3.3	14	33
		Belanja Modal Peralatan Komputer												
		Laser Printer		3	100%	3	100.00	2.088.000,00	1,99					
								2.088.000,00						
								1.891.450,00	1,99					
								101.356.350,00						
		Jumlah						101.356.350,00		96,74				3.418.830,00

Terminazione 31 Dicembre 2025

Office: Maryland, U.S. Sen., M. St.
NIP: 1970092414990031001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2025

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
U P B : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	ASET TETAP	
		22.814.851.208,43
1	TANAH	2.424.331.171,43
1.01	TANAH	2.424.331.171,43
2	PERALATAN DAN MESIN	11.719.410.444,00
2.01	ALAT BESAR	5.776.000,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	4.351.577.196,00
2.03	ALAT BERKEL DAN ALAT UKUR	11.330.000,00
2.04	ALAT PERTANIAN	92.988.000,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.969.350.110,02
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	905.961.100,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	766.343.000,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	52.290.000,00
2.09	ALAT PERSENGKATAN	29.900.000,00
2.10	KOMPUTER	2.858.835.317,98
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGGERAKAN	0,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	26.130.000,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	27.430.000,00
2.16	ALAT PERAGA	621.498.750,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	0,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	7.409.333.474,00
3.01	BANGUNAN GEDUNG	6.349.494.671,00
3.02	MONUMEN	0,00
3.03	BANGUNAN HENARA	0,00
3.04	TUJU TITIK KONTROL/PACI	1.140.838.803,00
4	JALAN, JARINGAN DAN IRRIGASI	381.776.110,00
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	0,00
4.02	BANGUNAN AIR	231.911.769,00
4.03	INSTALASI	0,00
4.04	SALIRAN	149.864.340,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	0,00
5.02	SARANG BERCORAK KEBERAGAN/KEBUKAYAAN/OLAH RAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	ISOTA PERAJARAN	0,00
5.05	TAMPAK	0,00
5.06	SARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM REMOVAL	0,00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERTIAAN	0,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERTIAAN	0,00
1.5	ASET LAINNYA	1.405.122.000,00
2	KEMERIAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00
2.01	KEMERIAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Dec-2025

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Bidang : Bidang Kependudukan
Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Sub Unit Organisasi : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
U P B : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	ASET TIDAK BERWUJUD	95.000.000,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	95.000.000,00
4	ASET LAIN-LAIN	1.510.121.000,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	1.510.121.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 02 Website : <https://dp2kb.kukartab.go.id>
E-mail : dp2kbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: B-20/DPPKB/UMUM/000.33/1/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di ruang Rapat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama : Yayan Aspianoor
NIP : 197209262007011008
Pangkat/Gol : Pengatur/IIc
Jabatan : Pengolah Data dan Informasi
Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Nama : Hennie Asfiyani, SE M.Si
NIP : 196810131999032007
Pangkat/Gol : Pembina /IVa
Jabatan : Perencana Ahli Muda
Dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Perangkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD Semester 2 dengan membandingkan data laporan BMD tahun 2025 dengan hasil sebagaimana dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca.

PIHAK KEDUA

Hennie Asfiyani, SE, M.Si
NIP.196810131999032007

PIHAK PERTAMA

Yayan Aspianoor
NIP. 197209262007011008

Mengetahui,
Kepala SKPD

Dafin Haryanto, S.Sos M.Si
NIP. 197009241990031001

Lampiran
 Nomor : B20/DPPKB/UMUM/000.33/1/2026
 Tanggal : 14 Desember 2026

BERITA ACARA REKONSILIASI

1. Saldo Awal

No	Uraian	Saldo Awal per 30 Juni 2025		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (14)-(15)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	179.398.275,00	179.398.275,00	
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	1.381.250.000,00	1.381.250.000,00	
	2. Peralatan dan Mesin	11.535.332.044,00	11.535.332.044,00	
	3. Gedung dan Bangunan	7.499.333.474,00	7.499.333.474,00	
	4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119,00	381.776.119,00	
	5. Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud	95.000.000,00	95.000.000,00	
	3. Aset Lain-lain	1.510.122.000,00	1.510.122.000,00	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi (17):

1. Tidak Terdapat selisih antara saldo awal Laporan BMD dengan Neraca Keuangan

Saldo Akhir

No	Uraian	Saldo Akhir per 31 Desember 2025		Perbedaan
		Laporan BMD Pengguna Barang (Rp)	Neraca SKPD (Rp)	
(19)	(20)	(21)	(22)	(23) = (21)-(22)
A.	ASET LANCAR			
	Persediaan	213.649.966	213.649.966	
B.	ASET TETAP			
	1. Tanah	2.414.331.171,43	2.414.331.171,43	
	2. Peralatan dan Mesin	11.719.410.444	11.719.410.444	
	3. Gedung dan Bangunan	7.499.333.474	7.499.333.474	
	4. Jalan, Jaringan, dan Irigasi	381.776.119	381.776.119	
	5. Aset Tetap Lainnya			
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
	7. Akumulasi Penyusutan			
C.	ASET LAINNYA			
	1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
	2. Aset Tidak Berwujud	95.000.000	95.000.000	
	3. Aset Lain-lain	1.510.122.000	1.510.122.000	
	4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud			
	5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			

Catatan Hasil Rekonsiliasi (24):

Tidak Terdapat selisih antara saldo Laporan BMD dengan Neraca Keuangan

PIHAK KEDUA



Hennie Asfyanie, SE., M.Si
NIP. 196810131999032007

PIHAK PERTAMA



Yayan Aspinoor
NIP. 197209262007011008

Mengetahui,
Kepala SKPD


Dafip Haryanto, S.Sos M.Si
NIP. 197009241990031001

KERTAS KERJA REKONSILIASI ASET DAN KEUANGAN TRIMULAM IV TAHUN 2025

NAMA SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JARINGAN JALAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KONSTRUKSI DALAM PEMERINTAHAN	JUMLAH
1.	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT NERACA KEUANGAN	1.381.250.000,00	11.535.332.044,00	7.499.333.474,00	381.776.119,00	-	-	20.797.591.637,00
	SALDO 31 DESEMBER 2024 MENURUT SIMDA BMD	1.381.250.000,00	11.535.332.044,00	7.499.333.474,00	381.776.119,00	-	-	20.797.591.637,00
2.	BELANJA MODAL JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025		101.376.350,00					101.376.350,00
3.	BELANJA BLUD JANUARI S/D 31 DESEMBER 2025							-
4.								-
	MUTASI TAMBAH							-
1	Koreksi Saldo Tahun 2024 Belum Diakomodir pada LIQPD (Menambah)							-
2	Hibah / Pendaptan Aset dari Pemerintah Pusat / Pihak Lain							-
3	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa							-
4	Pengadaan BMD yang Dianggarkan dalam Belanja Barang dan Jasa Di bawah Tahun 2025							-
5	Barang Tumbuhan Baru (Musa Tahun 2025)							-
6	Pengakuan Hutang Tahun Berjalan		91.408.500,00					91.408.500,00
7	Mutasi Masuk dari OPD Lain	1.033.081.171,43						1.033.081.171,43
8	Reklasifikasi dari Aset Lainnya							-
	a) Barang Rusak Berat							-
	b) Barang Hilang							-
	c) Aset Tak Berwujud							-
	d) Aset PSD							-
	e) Aset PDA/ Yang Pancing							-
	f) Aset Diserasmatkan							-
	g) Kekurangan Volume							-
9	Reklasifikasi dari Aset Ekstra Komputabel							-
	a) Aset Di bawah Kapabilitas Aset Tetap							-
	b) Aset Di bawah Kapabilitas Rusak Berat							-
	c) Aset Di bawah Kapabilitas PSD							-
10	Reklasifikasi dari Aset Bermasalah Hasil Inventarisasi/Sensus BMD Tahun 2012/2013							-
	a) Barang Dalam Penelurusan Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	b) Barang Hilang Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
	c) Barang Diserahkan ke Masyarakat Tanpa BA Hasil Inventarisasi dan Sensus 2012/2013							-
11	Reklasifikasi Antar Aset Tetap (Kib)							-
	a) antar KIB A - KIB B							-
	b) antar KIB A - KIB C							-
	c) antar KIB A - KIB D							-
	d) antar KIB A - KIB E							-
	e) antar KIB A - KIB F							-
	f) antar KIB B - KIB C							-
	g) antar KIB B - KIB D							-

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	No Register	Merek	Bahan	Tahun Pembelian	No Seri Pabrik	Asal usul	Harga
1	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000052	Panasonic / YN18AKJ	Fiber	2025	8887649862236	Pembelian	11.520.000
2	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000053	Panasonic / YN18AKJ	Fiber	2025	8887649862537	Pembelian	10.300.000
3	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000054	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	347641262212	Pembelian	6.000.000
4	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000055	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	347641262135	Pembelian	6.000.000
5	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000056	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	347641265513	Pembelian	6.000.000
6	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000057	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	347641226837	Pembelian	6.000.000
7	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000058	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	3476412127654	Pembelian	6.000.000
8	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000059	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	3476414725690	Pembelian	6.000.000
9	1 3 2 05 002 004 004	A.C Split	000060	Panasonic / YN9AKJ	Fiber	2025	34764154320176	Pembelian	6.000.000
10	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000153	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8JXM45036	Pembelian	4.905.700
11	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000154	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8JXM44531	Pembelian	4.295.700
12	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000155	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8JXX476528	Pembelian	4.295.700
13	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000156	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8BHM44573	Pembelian	4.295.700
14	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000157	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8BHM45726	Pembelian	4.295.700
15	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000158	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8BHM54367	Pembelian	4.295.700
16	1 3 2 10 002 003 003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000159	EPSON / L 2359	Fiber	2025	X8BHM2798257	Pembelian	4.295.700
17	1 3 2 05 001 005 033	Laser Pointer	000001	LOGITECH / R400	Fiber	2025	2442WDW10FB9	Pembelian	627.150
18	1 3 2 05 001 005 033	Laser Pointer	000002	LOGITECH / R400	Fiber	2025	2417WDW10FB9	Pembelian	627.150
19	1 3 2 05 001 005 033	Laser Pointer	000003	LOGITECH / R400	-	2025	3425WDW11FB12	Pembelian	627.150
20	1 3 2 05 002 004 006	Kipas Angin	000018	PANASONIC / F-EQ405	Besi	2025	34764154758624	Pembelian	999.000
21	1 3 2 05 002 004 006	Kipas Angin	000019	PANASONIC / F-EQ405	Besi	2025	3476478562348	Pembelian	999.000
22	1 3 2 05 002 004 006	Kipas Angin	000020	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645862357	Pembelian	999.000
23	1 3 2 05 002 004 006	Kipas Angin	000021	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645853983	Pembelian	999.000
24	1 3 2 05 002 004 006	Kipas Angin	000022	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645809754	Pembelian	999.000
Jumlah									101.378.350

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna

[Signature]

Hi Bertha Melania,SE M.Si
NIP. 197304061998032009

Tenagarong, 30 Desember 2025
Pengurus Barang

[Signature]

Yayan Aspiandor
NIP. 197209262007011008

DAFTAR HUTANG
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2025

No	Kode Barang	Nama Barang	No Register	Merak	Bahan	Tahun Pembelian	No Seri Pabrik	Asal utuk	Harga	Keterangan
1	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000025	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
2	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000026	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
3	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000027	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
4	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000028	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
5	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000029	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
6	1.3.2.05.001.004.005	Filing Cabinet Besi	000030	Brother / 4 Laci	Besi	2025	50X120 cm	Pembelian	6.382.500	Belanja Modal Pengadaan Filing Cabinet Besi
7	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000091	LENOVO IDEAPAD / touchscreen	Fiber	2025	YXOFTWD7	Pembelian	17.704.500	Belanja Modal Pengadaan Laptop An Hj Bertha Melania SE M Si
8	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000092	LENOVO IDEAPAD / touchscreen	Fiber	2025	YXOFTWE9	Pembelian	17.704.500	Belanja Modal Pengadaan Laptop An Yayan Asplanoor
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000093	LENOVO IDEAPAD / touchscreen	Fiber	2025	YXOFTWE 12	Pembelian	17.704.500	Belanja Modal Pengadaan Laptop An Rama Muzakar
Jumlah									91.408.500	

Pelabat Penatausahaan Barang Penguna

Tenggarong, 30 Desember 2025
Pengurus Barang



Hj Bertha Melania SE M Si
NIP. 197304061998032009

Yayan Asplanoor
NIP. 197209262007011006



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 312/SK-BUP/HK/2025

TENTANG
PERUBAHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan untuk menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah sehingga kepastian hak, wewenang dan tanggung jawab kepala organisasi perangkat daerah jelas dan transparan maka perlu status pengguna barang milik daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa terdapatnya ketidaksesuaian nilai penyajian dan register pencatatan barang milik daerah di dalam Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 182/SK-BUP/HK/2025 dengan pencatatan di aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah Tahun 2025 yang menimbulkan ketidakpastian nilai barang dan register barang yang ditetapkan status peralihan dan Mutasi Penggunaan Barang Milik Daerah Tahun 2025;
 - c. bahwa perubahan penetapan status terhadap Penggunaan Barang Milik Daerah, berdasarkan atas usulan dari perangkat daerah pemrakarsa sebagaimana disebutkan dalam Telaahan Staf yang disampaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Tahun 2025;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 55);

Memperhatikan: Telaahan Staf dari Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 2 Oktober 2025 Nomor: B-4415 /BPKAD/BAS.1/10 /2025 Perihal Perubahan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penetapan Status Penggunaan barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Perubahan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA: Penetapan Status sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhadap Barang Milik Daerah tersebut wajib dilakukan Pengelolaannya oleh Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA: Barang Milik Daerah yang ditetapkan statusnya dengan nilai harga perolehan secara keseluruhan sejumlah Rp96.306.781.286,43 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah empat puluh tiga sen);
- KEEMPAT: Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 182/SK-BUP/HK/2025, tanggal 14 Juli 2025 tentang Penetapan Penggunaan Barang Milik Daerah yang mengatur khusus atas nama/jenis Barang Milik Daerah di dalam Keputusan ini

pada Perangkat Daerah asal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

KEENAM: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 November 2025
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

td

AULIA RAHMAN BASRI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Asisten Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
3. Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala Perangkat Daerah se – Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum



PURNOMO, S.H.
NIP-197806052002121002

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN INPATI KABUPATEN KUPAT KARTANAGARA
NOMOR 213/SLC/INP/KE/2025, TANGGAL, 19 NOVEMBER 2025
TENTANG PERUBAHAN STATUS PENGUSAHA BARANG MILIK DAUDAH
SADA PERANGKAT DASAR TANGSEN 2025

[illegible]

No. Item	Nama Item	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	No. Faktur No. Invoice No. Faktur No. Invoice / No. Faktur	Gross	Uraian	Jumlah	Tahun Produksi / Pengadaan	No. Kertas Barang	Jumlah Barang / Kegunaan	Harga Perkiraan (Rp.)	Kalkulasi Barang			Keterangan		
												Jumlah (kg)	Kursing Basis (kg)	Jumlah Barang (kg)			
1												1.5	1.5		1.5		
100	REKAMERAN LUBA JAWA	Rekameran Luba Jawa	Tigress / All Nip Avanza 1.5 G M/T	KT 1376-0 2008040214 MURABIT/NOOR 999				2008	1.2.002.001.000.000	1	100000	8			REKAMERAN LUBA (JAWA)		
100	REKAMERAN LUBA JAWA	Rekameran Luba Jawa	Tigress / All Nip Avanza 1.5 G M/T	KT 1376-0 2008040214 MURABIT/NOOR 999				2008	1.2.002.001.000.000	1	100000	9			REKAMERAN LUBA (JAWA)		
											100.000.000.000						
	TOTAL														100.000.000.000		

BUPATI KUTAI KARTANEGERA

Ttd

AULIA RAHMAN BASRI

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN TAHUN 2025 EXTRAKOM

No	Kode Barang	Nama Barang	No Register	Merak	Bahan	Tahun Pembeli	No Seri Pembeli	Asal usul	Harga	Keterangan
1	1.3.2.05.001.006.033	Laser Pointer	000001	LOGITECH / R400	Fiber	2025	2442WDW10FB9	Pembelian	627.150.00	Belanja Modal Alat Presenter untuk Sekretaris
2	1.3.2.05.001.006.033	Laser Pointer	000002	LOGITECH / R400	Fiber	2025	2417WDW10FB9	Pembelian	627.150.00	Belanja Modal Alat Presenter untuk kadis
3	1.3.2.05.001.006.033	Laser Pointer	000003	LOGITECH / R400	-	2025	3425WDW11FB12	Pembelian	627.150.00	Belanja Modal Alat Presenter Kasubag
4	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000018	PANASONIC / F-EQ405	Besi	2025	34764154758024	Pembelian	999.000.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kecamatan Muara Jawa
5	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000019	PANASONIC / F-EQ405	Besi	2025	3476478662348	Pembelian	999.000.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Kota Bangun
6	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000020	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645802357	Pembelian	999.000.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Balai Penyuluhan KB Kecamatan Muara Muntai
7	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000021	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645803963	Pembelian	999.000.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Balai Penyuluhan KB
8	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000022	PANASONIC / F-EQ405	Fiber	2025	347645809754	Pembelian	999.000.00	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin Balai Penyuluhan KB
							Jumlah		6.876.450.00	

Peljabat Penatausahaan Barang Pengguna



Hi Bertha Melania SE M Si
NIP. 197304061998032009

Terlantarang, 30 Desember 2024
Pengurus Barang



Yayan Asplendor
NIP. 197209262004011008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelawat No 48 Tenggarong Website: <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail: dp2kbkukar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B. 25/DPPKB/UMUM/800.2.3/1/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lindawati S.Sos M.Kes

NIP : 19711213 199103 2 001

Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a

Jabatan : Pjt. Sekretaris Dinas Pengdalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat Barang dalam Kondisi Rusak Berat yang belum di musanakan selama Tahun 2025 yaitu pada Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 1.510.122.000,- (daftar terlampir)

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 14 Januari 2026
Pjt Sekretaris Dinas


Sri Lindawati S.Sos M.Kes
NIP. 19711213 199103 2 001

DAFTAR ASET TIDAK BERWUJUD
TAHUN 2024

No.	IDPemda	OPD	Kode Barang	Nama Barang	No. Reg	Tgl. Perolehan	Tgl. Pembukuan	Asal usul	Harga	Keterangan
1	10040010 01600000 1	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.5.3.1.1. 5.1	Software	1	11/22/2023	12/28/2023	Pembelian	95,000,000.00	Pembuatan/Pengembangan Software/Aplikasi

Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna


Hi Bertha Melania, SE M. Si
NIP. 197304061998032009

Tenggarong, 30 Desember 2025
Pengurus-Barang


Yayan Aspihanoor
NIP. 197209262007011008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelawat No 48 Tenggarong Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbkukarkab@gmail.com Kode Pos 75512

BERITA ACARA STOK OPNAME BARANG PERSEDIAAN

No : P. 714/DP2KB/Umum/036/12/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun dua ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Bertha Melania, SE M.Si
NIP : 197304061998032009
Jabatan : Pejabat PenatataUsahaan Barang Pengguna

Melakukan pemeriksaan stok opname fisik barang persediaan per 31 Desember 2025 di gudang barang persediaan DINAS PENEGDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA bersama Pengurus Barang Pengguna :

Nama : Yayan Aspianoor
NIP : 19720926 200701 1 008
Jabatan : Pengurus Barang pengguna

Berdasarkan hasil pelaksanaan stok opname di gudang barang persediaan, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Stok opname dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah Barang dan dengan Kartu Stock Barang
2. Dari hasil stok opname tersebut, diketahui bahwa tidak ada perbedaan jumlah barang antara Jumlah Fisik Barang Persediaan yang tercatat pada Kartu Stock Barang, maupun jumlah Barang di Gudang
3. Tidak Terdapat barang persediaannya yang kondisinya sudah rusak/usang
4. Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Persediaan per 31 Desember 2025, maka nilai persediaan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar **Rp 213.649.966,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)** yang terdiri dari **Persediaan (ATK) sebesar Rp 14.844.900,- (Empat Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)** dan **Persediaan Alakan Rp. 198.805.066,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Puluh Enam Rupiah)** Daftar Stock opname Terlampir

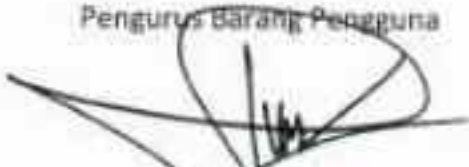
Demikian berita acara ini dibuat, guna dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat PenatataUsahaan
Barang Pengguna


Hj. Bertha Melania, SE M.Si
NIP. 197304061998032009

Tenggarong 31 Desember 2025

Pengurus Barang Pengguna


Yayan Aspianoor
NIP. 19720926 200701 1 008

RINCIAN MUTASI DAN SALDO PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2025
(STOCK OPNAME PER 31 DESEMBER 2025)

No	Nama Barang	Keadaan Per 31 Des 2024			Mutasi 1 JANUARI s/d 31 DESEMBER 2025					Keadaan Per 31 DESEMBER 2025			
		Banyaknya Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)	Bertambah			Berkurang	Jumlah Barang di gunakan	Stock Opname	Harga Satuan(Rp)	Jumlah	(Rp)
					Banyaknya Barang	Harga Satuan(Rp)	Jumlah Harga (3 + 5)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	
1	Map Plastik	0	11,400	0	100	12,200	1,220,000	100	70	30	12,200	366,000	
2	Balpoint Standar (Pilot 2 Hitam)	0	6,500	0			0	0	0	0	0	0	0
3	Balpoint Ballner	0	33,700	0			0	0	0	0	0	0	0
4	Binder Clip No 105	61	8,900	542,900			0	61	50	11			0
5	Binder Clip No 155	10	20,000	200,000	50	21,300	1,065,000	60	50	30	21,300	213,000	
6	Binder Clip No 200	0	35,500	0	50	37,900	1,895,000	50	50	0	37,900	37,900	0
7	Binder Clip No 260	8	45,500	364,000	50	48,400	2,420,000	58	50	8	48,400	387,200	0
8	Binder Clip No 107	0	11,000	0	50	11,900	595,000	50	50	0	11,900	11,900	0
9	Map Kertas	0	3,300	0	150	3,600	540,000	150	111	39	3,600	140,400	
10	Kertas NCR 3 Warna Putih	4	151,500	606,000	30	147,000	4,410,000	34	30	4	147,000	588,000	
11	Kertas NCR 3 Warna merah	3	151,500	454,500	30	147,000	4,410,000	33	30	3	147,000	441,000	
12	Kertas NCR 3 Warna Kuning	3	151,500	454,500	30	147,000	4,410,000	33	30	3	147,000	441,000	
13	Tip Ex	3	58,500	175,500	0	58,500	0	3	1	0	58,500	58,500	0
14	Cutter	2	8,500	17,000	0	8,500	0	2	2	0	8,500	8,500	0
15	Double Tape	10	34,500	345,000	50	37,000	1,850,000	60	50	10	37,000	370,000	
16	Isi Cutter ukuran Sedang	0	16,500	0	50	11,900	595,000	50	50	0	11,900	11,900	0
17	Lakban Hitam	0	12,000	0		12,000	0	0	0	0	12,000	12,000	0
18	Lem Kertas	23	25,200	579,600		25,200	0	23	23	0	25,200	25,200	0
19	Peniggaris	0	18,950	-		18,950	0	0	0	0	18,950	18,950	0
20	Staffler	9	32,500	292,500		32,500	0	9	9	0	32,500	32,500	0
21	Isi Staffles	3	5,500	16,500	200	6,000	1,200,000	203	150	53	6,000	318,000	
22	Kertas HVS A4	72	112,500	8,100,000	100	134,000	13,400,000	172	170	2	134,000	268,000	
23	Kertas HVS F4	137	142,500	19,522,500	150	150,000	22,500,000	287	258	29	150,000	4,350,000	
24	Tinta isi ulang Hitam	32	127,500	4,080,000	153	135,000	20,655,000	185	180	5	135,000	675,000	
25	Tinta warna Biru	3	127,500	382,500	66	135,000	8,910,000	69	60	9	135,000	1,215,000	
26	Tinta warna Merah	2	127,500	255,000	66	135,000	8,910,000	68	60	8	135,000	1,080,000	
27	Tinta warna Kuning	4	127,500	510,000	68	135,000	9,180,000	72	60	12	135,000	1,620,000	
28	Post it 653	61	18,500	1,128,500		18,500	0	61	60	1	18,500	18,500	
29	Post it 657	0	10,500	0		10,500	0	-	0	-	10,500	10,500	0
30	Post it	0	34,500	0	200	20,100	4,020,000	200	156	44	20,100	884,400	
31	Correction Pen	0	25,600	0	41	69,800	2,861,800	41	41	0	69,800	69,800	0

32	Stafier Hecter		0	174,950	0		174,950	0	0	0	174,950	0
33	Stafier HD-50		0	119,950	0		119,950	0	0	0	119,950	0
34	Stafier Remover		0	45,900	0		45,900	0	0	0	45,900	0
35	Gunting		0	16,500	0	50	13,800	690,000	50	0	13,800	0
36	Pulpen Tinta Gel Medium Standar					200	7,100	1,420,000	200	178	7,100	156,200
37	Paper Clip WARNA 50 MM					200	13,800	2,760,000	200	165	13,800	483,000
38	Spidol					80	32,800	2,624,000	80	61	32,800	623,200
39	Buku Tulis 78 Lembar isi 5					28	50,800	1,422,400	28	28	50,800	0
40	Kalkulator PRINTING CALCULATOR					6	1,990,000	11,940,000	6	6	1,990,000	0
41	Pulpen Tinta Gel HIGH STANDAR					50	9,600	480,000	50	50	9,600	0
42	Stabilo KUALITAS STANDAR					100	13,800	1,380,000	100	85	13,800	207,000
43	Buku Agenda Keluar & Masuk 100 LEMBAR					5	68,700	343,500	5	5	68,700	0
44	Stapler Remover HIGH QUALITY					19	170,000	3,230,000	19	19	170,000	0
45	Kertas Karton KERTAS CASING 28 X 40 CM EXTRA FOLIO					10	136,000	1,360,000	10	10	136,000	0

			38,026,500			142,696,700					14,844,900	
ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI												
46	IUD Cover T	33	12,614	416,262	1,000	12,614	12,614,000	1,033	673	360	12,614	4,541,040
47	Pil KB 1 Kombinasi	1,330	1,350	1,795,500	10000	1,350	13,500,000	11,330	11,330	-	1,350	-
48	Kondom	252	127,855	32,219,460	600	10,635	6,393,000	852	805	47	10,635	500,785
49	Suntikan KB Kombinasi	1,160	12,800	14,848,000	12,000	12800	153,600,000	13,160	8,860	4,300	12800	55,040,000
50	Suntikan KB Progesterone	4,825	6,385	30,807,625	12,000	4825	57,900,000	16,825	9,365	7,460	4825	35,994,500
51	Implant 1 Batang (Set)	90	238,000	21,420,000	-	238,000	-	90	90	-	238,000	-
52	Implant 2 Batang (Set)	105	150,015	15,751,575	850	172485	146,612,250	955	582	373	172485	64,336,905
53	Faloperting	0	0	0	0	50000	-	-	7	7	50000	350,000
54	ADN Suntik	4,436	1,021	4,529,156	7,800	1150	9,039,000	12,296	7,931	4,365	1150	5,019,750
55	Dak Pelubang	1,252	6,860	8,588,720	3,000	6700	20,100,000	4,252	3,462	790	6700	5,293,000
56	Asam Mefenamat	565	1,170	661,050	5,000	1170	5,850,000	5,565	5,180	385	1170	450,450
57	Yodine povidone 30 MI	98	3,450	338,100	-	3,450	-	98	98	-	3,450	-
58	Lido Caine	617	1,341	827,397	1,200	1341	1,609,200	1,817	921	896	1341	1,201,536
59	Dermafix	371	600	222,600	4,000	3839	15,756,000	4,371	3,816	555	3939	2,186,145
60	Masker	769	577	443,713	6,500	550	3,575,000	7,269	6,312	957	550	526,350
61	Hand Socon	429	6,050	2,595,450	7,000	7600	53,200,000	7,429	6,751	678	7600	5,152,800
62	ADS Implant	2,479	1,021	2,531,059	15,020	1150	17,273,000	17,499	4,502	12,997	1150	14,946,550
63	Safety Bok	116	25,613	2,971,108	120	25613	3,073,560	236	153	83	25613	2,125,879
64	Pil Progesterin	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	0
65	Baju Hasmat	3	135000	405,000	0	135000	3	0	0	3	135000	405,000
66	Implant Removal KIT	0	135,000	0	0	135,000	0	0	0	0	135,000	0
67	Natrium Dilopetia 25 Mg	0	8,288	0	0	8,288	0	0	0	0	8,288	0
68	Povidone				148	4,962	734,376	148	0	148	4,962	734,376



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelawat No 40 Tenggarong Website : <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail : dp2kbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B.21 /DPPKB/UMUM/800.2.3/1/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lindawati.S.Sos M.Kes
NIP : 19711213 199103 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a
Jabatan : PIt. Sekretaris Dinas Pengdalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Menerima Droping Alat dan Obat Kontrasepsi dengan nilai Akhir Rp.198.400.066 dari BKKBN Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2025 (daftar Terlampir).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 14 Januari 2026
Pit Sekretaris Dinas

Sri Lindawati.S.Sos M.Kes
NIP. 19711213 199103 2 001

**BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
ALOKON DAN NON ALOKON
GUDANG KAB/KOTA KUTAI KARTANEGARA
PERIODE SEMESTER II TAHUN 2025**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan dibawah ini:

<u>Nama :</u>	<u>Jabatan :</u>
1. Sri Lindawati,S.Sos.,M.Kes	Ketua
2. Yayan Aspianoor	Sekretaris
3. Ipai Martini	Anggota

Selaku tim penghitungan barang yang ditunjuk dengan Keputusan/Instruksi/Tugas/Kepala OPDKB Tanggal 18 Desember 2025 Nomor 95/DPPKB/Um/467.1/12/2025 Telah melakukan penghitungan barang-barang yang masih ada dalam persediaan di gudang Alokasi Kabupaten/Kota, Dinas/Badan/Kantor OPDKB, per tanggal 31 Desember 2025

Hasil perhitungan barang persediaan ini dituangkan dalam bentuk Laporan Penghitungan Persediaan/Opname Fisik Semester II Barang Persediaan dan merupakan lampiran dari berita acara ini.

Untuk barang-barang yang rusak/kedaluwarsa dipisahkan dan diusulkan untuk dihapuskan sesuai prosedur yang ditetapkan.

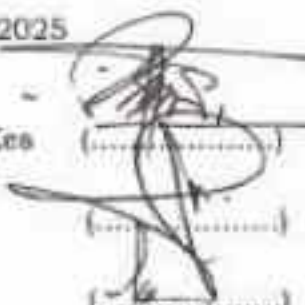
Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan mestinya.

Mengetahui,
Plt Kepala Instansi


Dafiq Haryanto,S.Sos.,M.Si
19/00924 199003 1 001

Tenggarong, 29 Desember 2025
Tim Opname Fisik,

1. Sri Lindawati,S.Sos.,M.Kes
2. Yayan Aspianoor
3. Ipai Martini



HASIL OPNAME FISIK ALOKON DAN NON ALOKON PADA GUDANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Nama Barang	Kondisi Baik				Kondisi Usang/Rusak							
		Kuantitas	Satuan	Nilai Satuan	Total Nilai	Expired Date	No. Batch	Kuantitas	Nilai Satuan	Total Nilai	Expired Date	Mat.	
Alok dan Obat Kontrasepsi													
1	RJD Copper 7	360	Buah	12614	4.541.240	01/02/2027	503.3052						
2	RJD Long Inserter												
3	PHI KIR Kamborid	0	Bungkus	0									
4	PHI Prospektin	0	Bungkus	0									
5	Kondom	47	Lusin	10885	500.785	30/12/2028	220111031						
6	Suntik Progestin	6160	Vial	4828	29.722.500	01/06/2028	350348						
7	Suntik Progestin	1200	Vial	4828	5.772.000	01/06/2028	462008						
8	Suntik Spermatocid	3500	Vial	12800	45.520.000	01/03/2027	5131011						
9	Suntik Kamborid	400	Vial	12800	5.120.000	01/03/2027	5131012						
10	Injeksi I Beding												
11	Injeksi II Beding	373	Set	172465	64.328.905	01/03/2029	5100004						
12	Falopie Ring/Tubal Ring	7	Set	60000	420.000	01/04/2028	01X 0916						
Total Nilai Alokasi		-	-	-	166.783.230	-	-	-	-	-	-	-	
Non Alok dan Obat Kontrasepsi/Batang Madu Habis Pakai													
1	Akan Mendenital	3652	Btl	1120	408.450	01/10/2026	250627120						
2	Lubricant	400	Arang	1341	536.400	30/08/2027	663620732						
3	Lubricant	480	Arang	1341	645.136	30/08/2027	660233						
4	Masok	835	Buah	550	459.250	30/05/2028	107368						
5	Masok	122	Buah	550	67.100	01/10/2027	km/Seco/2101						
6	Auto Usable Injeksi (Suntik)	4355	Pis	1180	5.019.750	31/12/2028	C24E 080005						
7	Demafix	55	Buah	2829	215.545	30/04/2028	250714884						
8	Demafix	500	Buah	2829	1.968.500	30/04/2028	03052586						
9	Povidone	140	Bocor	4962	734.376	01/12/2028	205268						
10	Santung Tangan	819	Buah	2800	2.152.800	01/03/2028	23184605						
11	Safety Box	831	Buah	25813	2.128.879	31/10/2028	20181168						
12	Auto Usable Injeksi (Implan)	12897	Pis	1180	14.949.500	31/08/2028	C24E 080005						
13	Cok Polycond Implant	790	Buah	8700	5.203.000	31/12/2027	250210425						
Total Nilai Non-Alokasi		-	-	-	37.836.838	-	-	-	-	-	-	-	
Total Nilai		-	-	-	166.400.066	-	-	-	-	-	-	-	

Mengarahkan/Manajemen
Bendahara/Ketua Pengelola Gudang

Tanggal: 29 Desember 2025
Ketua Tim: 250231 Opname


Bdk Lendawati A. Ros, M.Kes
19711213 390102 2 001

Yasni, Angkasa
19720309 200701 3 001

- Keterangan:
1. Barang akan divalidasi masing-masing per nomor fisik.
2. Kolom Keterangan pada Persediaan Usang/Rusak (bila physical penghapusan yang telah diuraikan dan disertai tembusan persediaan (bila barang persediaan tidak habis persediaan)

DAFTAR ASET PERALATAN & MESIN
Aset Dibawah Kapitalisasi

No.	OPD	Kode Barang	Nama Barang	Mt. Rng	Harga	Keterangan	Tgl. Pengiriman	Merk	Type	Bahan	Asal usul	Kondisi	KATEGORI ASSET
1	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Printer (Pencetakan, Pemroses, Komputer)	1	924.000,00	PRINTER INKJET	12/01/2014	CANON	PODA IP 150		Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
2	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	1	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
3	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	2	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
4	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	3	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
5	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	4	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
6	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	5	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
7	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	7	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
8	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	8	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
9	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	9	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
10	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	10	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
11	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	11	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
12	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	12	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
13	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	13	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
14	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	14	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
15	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	15	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
16	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	16	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
17	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	17	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
18	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	18	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
19	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	19	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
20	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	20	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
21	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	21	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
22	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	22	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
23	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	23	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
24	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	24	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
25	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	25	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
26	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	26	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
27	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	27	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
28	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	28	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
29	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	29	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
30	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	30	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
31	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	31	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
32	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	32	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
33	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	33	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
34	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	34	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
35	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	35	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
36	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	36	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
37	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	37	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
38	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	38	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
39	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	39	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
40	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	40	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM
41	DINAS PEMERINDALAN PENDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.2.2.10.2.3.3	Kursi Lipat	41	580.000,00		4/25/2011	Chaise		Besi dan Buss	Pembelian	Baik	EKSTRANAKOM

188	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Maj. 1/2 Bhs	1	530.000.00	Selanjutnya Pengadaan Mula Untuk Baku Penyuluhan KB di Kota Bangun	12/7/2016	12/31/2016	Volume	VOOM 120	Pembelian	Rak	EKSTRANORM
190	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Maj. 1/2 Bhs	2	530.000.00	Selanjutnya Pengadaan Mula Untuk Baku Penyuluhan KB di Kota Bangun	12/7/2016	12/31/2016	Volume	VOOM 120	Pembelian	Rak	EKSTRANORM
191	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Kursi Papan Nisi Struktural	86	784.000.00	Pengadaan Kursi Untuk Baku Penyuluhan KB di Kota Bangun	12/7/2016	12/31/2016	Alasan	AN 902 T	Pembelian	Rak	EKSTRANORM
192	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Kursi Papan Nisi Struktural	87	784.000.00	Pengadaan Kursi Untuk Baku Penyuluhan KB di Kota Bangun	12/7/2016	12/31/2016	Alasan	AN 902 T	Pembelian	Rak	EKSTRANORM
193	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Alat Pembersih Air	7	200.000.00	Alat Pembersih Air	12/7/2016	12/31/2016	Produk	Isi Baku 5001	Pembelian	Rak	EKSTRANORM
194	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Alat komunikasi telephone	1	500.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	12/7/2016	12/31/2016	Produk		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
195	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	62	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
196	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	63	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
197	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	64	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
198	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	65	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
199	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	66	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
200	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	67	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
201	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	68	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
202	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	69	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
203	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	70	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
204	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	71	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM
205	DIRAS PENGENDALIAN PENJAJARAN DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.24	Kursi Lipat	72	418.000.00	Pengadaan Meubelair Alat Pembersih dan	6/13/2017	6/13/2017	Online		Pembelian	Rak	EKSTRANORM

261	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	115	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
262	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	115	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
263	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	120	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
264	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	121	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
265	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	122	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
266	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	123	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
267	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	124	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
268	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	125	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
269	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	126	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
270	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	127	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
271	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	128	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
272	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	129	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
273	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	130	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR
274	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.36	Kursi Lipat	131	495.000.00	Kursi Lipat (Untuk Balai Penyuluhan KB Masyarakat)	6/17/2019	6/17/2019	Chinese	-	Pembelian	Rak	EKSTRAKOR

288	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.10.2.4.4	Modem	3	605.000.00	Modem untuk Penyediaan KIB Kecamatan	6/1/2019	6/1/2019	0/1/2019			Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
289	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.10.2.4.3	Perangkat Jaringan	1	330.825.00	Kabel H4M	1/1/2019	1/1/2019	1/1/2019	KAB		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
290	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.10.2.4.3	Perangkat Jaringan	2	330.825.00	Kabel H4M	1/1/2019	1/1/2019	1/1/2019	KAB		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
291	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.10.2.4.3	Perangkat Jaringan	3	330.825.00	Kabel H4M	1/1/2019	1/1/2019	1/1/2019	KAB		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
292	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.10.2.4.3	Perangkat Jaringan	4	330.825.00	Kabel H4M	1/1/2019	1/1/2019	1/1/2019	KAB		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
293	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	1	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
294	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	2	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
295	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	3	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
296	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	4	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
297	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	5	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
298	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	6	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
299	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	7	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
300	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	8	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
301	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	9	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
302	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	10	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
303	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	11	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
304	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	12	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
305	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	13	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
306	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	14	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
307	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	15	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
308	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	16	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
309	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	17	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
310	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	18	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
311	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	19	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
312	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.1.30	Kursi Rapet	20	693.000.00	Kursi Rapet	8/1/2020	8/1/2020	8/1/2020	CHITONE		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
313	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.4.7	Exhaust Fan	18	390.300.00	Exhaust Fan Fan	11/21/2022	11/21/2022	11/21/2022	Parasitonic	12	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
314	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	573.000.00	Tray	11/21/2022	11/21/2022	11/21/2022	Ngus		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
315	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.5.2.6.77	Alat Rumah Tangga Lainnya	4	573.000.00	Tray	11/21/2022	11/21/2022	11/21/2022	Ngus		Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
316	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.6.1.2.154	Kamera DOME	1	645.820.00	Perbaikan atau Pemecatan	12/1/2022	12/1/2022	12/1/2022	lggtech	(2-10-14)	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
317	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	4	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
318	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	5	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
319	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	6	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
320	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	7	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
321	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	8	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
322	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	9	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
323	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.5	Tensimeter	10	387.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Quimed	dash	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
324	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.1.160	Alat Kesehatan umum lainnya	10	598.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Autoshock	CO19	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
325	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.1.160	Alat Kesehatan umum lainnya	11	598.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Autoshock	CO19	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM
326	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.7.1.1.160	Alat Kesehatan umum lainnya	12	598.000.00	alat Tensiometer	6/14/2023	6/14/2023	6/14/2023	Autoshock	CO19	Pembelian	Risk	EKSTRAKOM

[illegible]

[illegible]

		1.3.2.13.3.5	Tenda		9	650.000,00	Maka Lupa Tenda untuk Kegiatan bedang	10/12/2024	10/12/2024	Agar	Tenda Tarp	Sisa dan Kain	Pembelian	Isi	Ekstensi
519	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.3.5	Tenda		9	650.000,00	KK	10/12/2024	10/12/2024	Agar	Tenda Tarp	Sisa dan Kain	Pembelian	Isi	Ekstensi
520	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.3.5	Lesser Pomer		1	527.150,00	Lesser Pomer	3/6/2025	3/6/2025	LOKATECH / R	Lesser Pomer	Filter	Pembelian	Isi	Ekstensi
521	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.3.5	Lesser Pomer		2	827.150,00	Lesser Pomer	3/6/2025	3/6/2025	LOKATECH / R	Lesser Pomer	Filter	Pembelian	Isi	Ekstensi
522	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.3.5	Lesser Pomer		3	827.150,00	Lesser Pomer	3/6/2025	3/6/2025	LOKATECH / R	Lesser Pomer	-	Pembelian	Isi	Ekstensi
523	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.4.6	Kipas Angin		18	999.000,00	Kipas Angin	3/6/2025	3/6/2025	PANASONIC /	Kipas Angin	Isi	Pembelian	Isi	Ekstensi
524	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.4.6	Kipas Angin		19	999.000,00	Kipas Angin	3/6/2025	3/6/2025	PANASONIC /	Kipas Angin	Isi	Pembelian	Isi	Ekstensi
525	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.4.6	Kipas Angin		20	999.000,00	Kipas Angin	3/6/2025	3/6/2025	PANASONIC /	Kipas Angin	Filter	Pembelian	Isi	Ekstensi
526	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.4.6	Kipas Angin		21	999.000,00	Kipas Angin	3/6/2025	3/6/2025	PANASONIC /	Kipas Angin	Filter	Pembelian	Isi	Ekstensi
527	DINAS PENGENDALIAN PENDUKUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.3.2.13.4.6	Kipas Angin		22	999.000,00	Kipas Angin	3/6/2025	3/6/2025	PANASONIC /	Kipas Angin	Filter	Pembelian	Isi	Ekstensi
Jumlah Total						325.598.870,00									

Pesidat Pembinaan Baring Pengguna


D. Dharma Mulyana, SE, M.Si
NIP. 19730401199032019

Tanggal: 30 Desember 2025
Pengguna Baring


Yayan Asih, NIP. 19720025200311008

[illegible]

[illegible]



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelayat No 48 Tenggarong Website: <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail: dp2kbkukarkab@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B.23 /DPPKB/UMUM/600.2.3/12026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lindawati.S.Sos M.Kes
NIP : 19711213 199103 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a
Jabatan : Ptt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Barang persediaan yang kadaluwarsa selama tahun 2025 dan belum pernah dikeluarkan dari daftar Persediaan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 14 Januari 2026
Ptt Sekretaris Dinas

Sri Lindawati.S.Sos M.Kes
NIP. 19711213 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelawat No 48 Tenggarong Website : <https://dp2kb.kutakab.go.id>
E-mail : dp2kb.kutakab@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B.24 /DPPKB/UMUM/800.2.3/1/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lindawati S.Sos M.Kes
NIP : 19711213 199103 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Barang yang diserahkan pada Masyarakat tetapi belum dibuatkan Berita Acara Serah Terima

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 14 Januari 2026
Plt Sekretaris Dinas



Sri Lindawati S.Sos M.Kes
NIP. 19711213 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Jalan Jelawat No 48 Tenggarong Website : <https://dp2kb.kukartab.go.id>
E-mail : dp2kbkukard@gmail.com Kode Pos 75512

SURAT PERNYATAAN

Nomor : B.22 /DPPKB/UMUM/800.2.3/1/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Lindawati S.Sos M.Kes
NIP : 19711213 199103 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina /IV.a
Jabatan : Plt. Sekretaris Dinas Pengdalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya Bahwa Dinas Pengedalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat Pemeliharaan /Renovasi atas Aset Tetap (berupa Gedung dan Bangunan, Jalan,Irigasi dan Jaringan) yang bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah /belum dikeluarkan dari Aset Tetap selama Tahun 2025

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Tenggarong, 14 Januari 2026
Plt Sekretaris Dinas

Sri Lindawati S.Sos M.Kes
NIP. 19711213 199103 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

2025

